

***POLITICAL LINKAGE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN PROVINSI LAMPUNG DENGAN ORGANISASI SAYAP
PARTAI PADA PEMILIHAN UMUM 2024***

(Skripsi)

Oleh:

**ANNISA AMIMI
NPM 2156021015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

***POLITICAL LINKAGE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN PROVINSI LAMPUNG DENGAN ORGANISASI SAYAP
PARTAI PADA PEMILIHAN UMUM 2024***

Oleh

ANNISA AMIMI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

***POLITICAL LINKAGE* PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI LAMPUNG DENGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

Oleh

ANNISA AMIMI

Fenomena penurunan suara PDI Perjuangan pada pemilu 2019 dari 27.503.961 (19,33%) menjadi 25.387.279 (16,33%) pada pemilu 2024 menunjukkan penurunan sebesar (7,69%). Tren ini juga terlihat pada penurunan perolehan kursi PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pemilu 2024 (KPU, 2024). Penelitian ini menganalisis bagaimana *political linkage* antara PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024. *Political linkage* merupakan pola hubungan antara politisi dengan konstituennya. Lokasi penelitian ini yaitu Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung, dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *Political Linkage* oleh Lawson (Hidayah, E.N. 2010) terdiri dari 3 indikator, yaitu sosialisasi, komunikasi, dan rekrutmen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sosialisasi telah dilakukan melalui diskusi, pertemuan dan rakerda, 2) komunikasi dijalin melalui rapat koordinasi dan program kegiatan, meskipun saluran politik perlu dioptimalkan, 3) rekrutmen kader tidak dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Provinsi Lampung menuju pemilu 2024, tetapi indikator lain sudah dilaksanakan melalui diklat pratama, madya dan utama, penugasan, kepeloporan, serta pelibatan Repdem dalam kegiatan politik perlu ditingkatkan. Kesimpulan penelitian ini adalah *linkage* antara PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP belum cukup terjalin, karena belum semua indikator penelitian terlaksana.

Kata Kunci: *Political Linkage*, Organisasi Sayap Partai, PDI Perjuangan

ABSTRACT

POLITICAL LINKAGE INDONESIAN DEMOCRATIC PARTY STRUGGLES LAMPUNG PROVINCE WITH PARTY WING ORGANIZATION IN THE 2024 GENERAL ELECTION

By

ANNISA AMIMI

The phenomenon of the decline in PDI Perjuangan's votes in the 2019 election from 27,503,961 (19,33%) to 25,387,279 (16,37%) in the 2024 election shows a decrease of (7,69%). This trend is also evident in the decrease in the number of seats won by PDI Perjuangan in Lampung Province in the 2024 election (KPU, 2024). This study analyzes how the political linkage between PDI Perjuangan Province of Lampung and OSP in the 2024 elections. Political linkage is a pattern of relationship between politicians and their constituents. The location of this research is the Regional Leadership Council of PDI Perjuangan in Lampung Province, using qualitative methods and a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. This research uses the Political Linkage theory by Lawson (Hidayah, E.N. 2010), which consists of 3 indicators: socialization, communication, and recruitment. The research results show that: 1) socialization has been carried out through discussions, meetings, and regional working meetings, 2) communication has been established through coordination meetings and activity programs, although political channels need to be optimized, 3) cadre recruitment was not carried out by PDI Perjuangan Province of Lampung towards the 2024 elections, but other indicators have been implemented through primary, intermediate, and advanced training, assignments, pioneering, and the involvement of Repdem in political activities needs to be increased. The conclusion of this research is that the linkage between PDI Perjuangan Provinsi Lampung and OSP has not yet been sufficiently established, as not all research indicators have been implemented.

Keyword: Political Linkage, Party Wing Organization, PDI Perjuangan

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

: ***Political Linkage Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dengan Organisasi Sayap Partai Pada Pemilihan Umum 2024***

Nama Mahasiswa

: ***Annisa Amimi***

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2156021015**

Program Studi

: **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Darmawan Purba, S. IP, M. IP
NIP. 198106012010121003

Bendi Juantara, S. IP., M.A
NIP. 198809232019031011

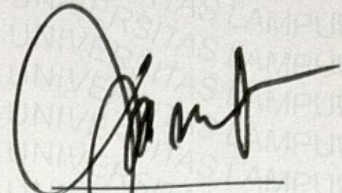
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Tabah Maryanah

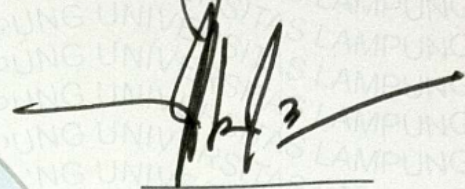
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

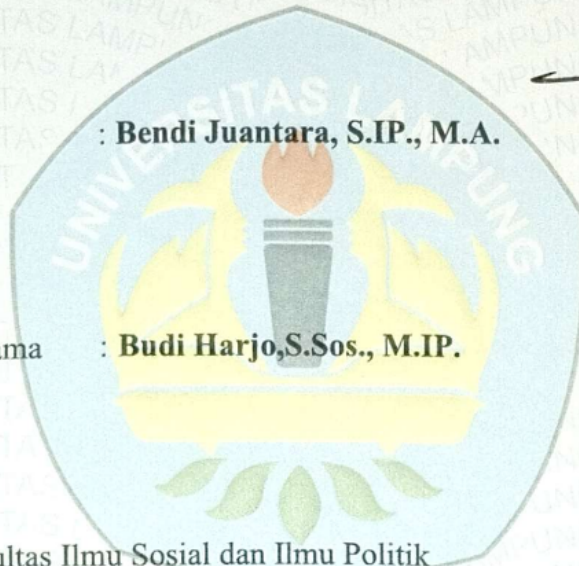
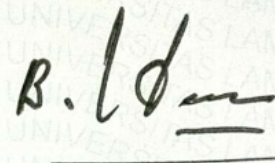
Ketua : **Darmawan Purba, S. IP, M. IP.**



Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP., M.A.**



Penguji Utama : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 April 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan



Annisa Amimi
NPM 2156021015

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Annisa Amimi, lahir pada tanggal 15 Desember 2002 di Bangunharjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Amat dan Ibu Wuryanti. Peneliti juga mempunyai kakak laki-laki yang bernama Rendy Nugraha.

Peneliti telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Bangunharjo pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Belitang hingga tahun 2018, dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Belitang dan lulus tahun 2021. Pada tahun 2021, peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN-Barat) dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2021.

Semasa perkuliahan, peneliti memiliki ketertarikan di bidang *editing*, sehingga peneliti ikut bergabung menjadi bagian dari Ikatan Mahasiswa OKU Timur (IKAM OKUT) pada bidang *Media Center*. Peneliti juga diamanahkan sebagai Sekretaris Bidang II Media Center IKAM OKUT Periode 2022/2023. Peneliti juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2024 di Kampung Rumbih, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Kemudian, peneliti juga melaksanakan magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

MOTTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan.

(QS. Al-Baqarah:5-6)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

(QS. Al-Baqarah:216)

Hidupkanlah dalam hatimu sebuah proses adalah jalan menuju sebuah hal yang kamu raih. Hidupkanlah dalam pikiranmu bahwa proses adalah suatu hal yang harus kamu hargai. Hidupkanlah dalam tindakanmu bahwa kamu berhak untuk berproses menjadi lebih baik lagi.

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Rabbil Aalamin,

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta

Amat dan Wuryanti

Kedua orang tua yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan cinta tanpa batas. Terima kasih atas semua pengorbanan, usaha, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena sudah bertahan sampai di titik ini. Mari tetap berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi berikutnya.

SANWACANA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil alamiin, puji syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Political Linkage Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dengan Organisasi Sayap Partai Pada Pemilihan Umum 2024”***. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari akhir.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan masih terdapat banyak kesalahan dan keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Skripsi ini dapat terselesaikan atas berbagai pihak yang berkontribusi dalam memanjatkan doa, memberikan bantuan dan dukungan terhadap peneliti, diantaranya yaitu:

1. Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala hidayah-Nya yang melimpahkan kemudahan, kesehatan, keselamatan dan pengetahuan sepanjang penulisan skripsi.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani,D.E.A.I.PM., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Dr. Anna Gustina Zainal,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Noverman Duadji,M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Dr. Arif Sugiono,M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Dr. Robi Cahyadi Kurniawan,S.IP.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasLampung.

7. Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
8. Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan, Dosen Pembimbing Akademik, dan Pembimbing Skripsi. Terima kasih selalu mengingatkan peneliti untuk tetap selalu semangat dan optimis dalam proses penulisan skripsi. Terima kasih atas semangat, motivasi, serta ilmu yang telah Bapak berikan. Doa dan dedikasi Bapak menjadi bagian penting dalam tercapainya penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT.
9. Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai skripsi ini terselesaikan. Terima kasih atas kesabaran, waktu, arahan serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. semoga Bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
10. Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semua masukan yang Bapak berikan menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri di masa yang akan datang. Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga Bapak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
12. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan, terima kasih sudah membantu peneliti dalam hal administrasi selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.
13. Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, atas bantuan, dukungan yang diberikan kepada peneliti dari program magang sampai proses skripsi ini selesai.
14. Kepada Informan Penelitian, terima kasih sudah membantu peneliti dalam mendapatkan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Pintu Surgaku, Ibu Wuryanti yang sudah mengandung, melahirkan dan membesarkan peneliti hingga saat ini. Terima kasih untuk seluruh doa yang telah dipanjatkan yang selalu menyertai hidup peneliti. Terima kasih telah memberikan rasa sayang yang tak pernah usai, selalu menuntun dan menasihati anak bungsu nya dalam menjalani hidup di perantauan. Beribu-ribu ucapan terima kasih tak akan pernah cukup atas pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Semoga selalu diberikan kesehatan agar dapat terus melihat anakmu sukses. Terima kasih, ibuku.

16. Cinta pertamaku, Bapak Amat. Terima kasih untuk selalu mengusahakan apapun untuk peneliti. Nasihat-nasihat yang selalu diberikan, untuk melibatkan Allah SWT dalam setiap urusan peneliti. Terima kasih telah menjadi bapak yang hebat, menjadi tameng dan panutan untuk anak-anaknya. Semoga segala usaha dan doa selalu menyertai kehidupan dan selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya pak, kalau aku masih sering mengecewakanmu. Hidup lebih lama ya pak untuk menyaksikan mimpi-mimpiku berikutnya.
17. Kakak penulis, Rendy Nugraha yang telah menjaga adik perempuannya selama ini. Mba Ayu Marlina, terima kasih karena peneliti bisa merasakan rasanya mempunyai kakak perempuan. Keponakanku, Tsabita Ayumi Nurgraha, yang menjadi salah satu penyemangat peneliti selama proses penyusunan skripsi.
18. Kelurga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a yang selalu menyertai peneliti selama ini.
19. Teman seperjuangan peneliti, Dewi Puspita Setyaningrum, Ni Wayan Amanda Ista Pramesti, Niluh Kristina. Terima kasih sudah menerima dan menemani peneliti dari awal perkuliahan sampai sekarang. Berbagi dukungan, motivasi, ejekan, canda tawa, tangis, dan bahagia yang kita lewati. Pertemuan kita memang cukup singkat, tapi semoga persahabatan ini akan terus terjalin selamanya. *I'm so lucky to meet you guys in my life. So thank you, all of you, for just being here for me.*
20. Sahabat peneliti sejak SD, Elsa Apriyana, Nabiilah Putri Riyanto, Soraya Ayu Mara, terima kasih telah kebersamai peneliti sampai saat ini, berbagi cerita, memberikan dukungan, semangat, dan apresiasi. Semoga persahabatan kita terjalin lebih lama lagi, dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Amiin.
21. Teman magang yang menjadi teman per-skripsian, Salsabila Al Fatahny dan Sindi Kurniawati. Terima kasih untuk tetap selalu bersama-sama dari proses magang, pengajuan judul, bimbingan, seminar proposal hingga menyelesaikan skripsi ini.
22. Teman-teman Ranjau Tim, Siti Nurhalizah, Yolanda Sabrina Putri, Juhi Tamia Sari, Shoffi Silva yang menambahkan keceriaan dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi.
23. Teman KKN Kampung Rumbih Periode 1 Tahun 2024, Dewinta Yulyanti, Rofila Sahda, Avicenna Rafif, M. Alif Ramadhan, Joshua Napitu yang menjadi teman serumah selama 40 hari. Terima kasih untuk kebersamaan yang begitu indah kala itu.
24. Kepada diri saya sendiri, yang sudah bertahan hingga saat ini disaat peneliti tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun, peneliti selalu mengingat dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun kadang terasa sulit atau lambat.

Terima kasih sudah sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Annisa Amimi. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 18 Maret 2025
Peneliti

Annisa Amimi
NPM. 2156021015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 <i>Political Linkage</i>	12
2.1.1 Tinjauan Teoritis <i>Political Linkage</i>	12
2.1.2 Jenis-Jenis <i>Political Linkage</i>	14
2.1.3 Faktor Yang Menyebabkan Kegagalan <i>Linkage</i>	15
2.1.4 Cara Merawat dan Membangun <i>Linkage</i>	15
2.2 Partai Politik.....	16
2.2.1 Tinjauan Teoritis Partai Politik.....	16
2.2.2 Fungsi Partai Politik.....	16
2.3 Organisasi Sayap Partai	18
2.3.1 Tinjauan Teoritis OSP.....	18
2.3.2 Fungsi OSP	19
2.3.3 Peran Strategis OSP	19
2.4 Pemilihan Umum	20
2.4.1 Tinjauan Teoritis Pemilihan Umum	20
2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum.....	20
2.4.3 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	21
2.5 Kerangka Pikir	22
III. METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	30
3.5 Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Pengolahan Data	35

3.8 Teknik Analisis Data.....	36
3.9 Teknik Keabsahan Data	38
IV. GAMBARAN UMUM	39
4.1 Gambaran Umum <i>Political Linkage</i>	39
4.2 Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	41
4.2.1 Sejarah PDI-Perjuangan.....	41
4.2.2 Visi, Misi, dan Tujuan	42
4.3 Gambaran Umum DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung.....	45
4.3.1 Logo Organisasi	45
4.3.2 Provinsi Lampung	46
4.4 Gambaran Umum OSP PDI Perjuangan Provinsi Lampung.....	48
4.4.1 Banteng Muda Indonesia (BMI)	49
4.4.2 Taruna Merah Putih (TMP)	51
4.4.3 Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)	52
4.4.4 Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).....	53
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Sosialisasi	55
5.1.1 Informasi atau Pesan Politik.....	55
5.1.2 Pengetahuan Politik	61
5.1.3 Pemberian Keyakinan dan Kepercayaan Politik	67
5.2 Komunikasi	75
5.2.1 Komunikator Politik	75
5.2.2 Saluran Atau Media Politik	81
5.2.3 Sasaran atau Target Politik.....	86
5.2.4 Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik.....	93
5.3 Rekrutmen	101
5.3.1 Rekrutmen Kader.....	101
5.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Kader Tingkat Dasar	104
5.3.3 Penugasan.....	109
5.3.4 Pendidikan dan Pelatihan Kader Tingkat Lanjut.....	113
5.3.5 Kepeloporan	120
5.3.6 Pelibatan	124
5.4 Analisis <i>Political Linkage</i> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP Pada Pemilu 2024	131
5.4.1 <i>Political Linkage</i> OSP dengan PDI Perjuangan	131
5.4.2 <i>Political Linkage</i> OSP dengan Pemilih	133
5.5 Dinamika Politik Lokal dan Dampaknya terhadap Perolehan Suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung	136
VI. SIMPULAN DAN SARAN	142
6.1 Simpulan	142
6.2 Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN.....	151

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Partai Nasional Peserta Pemilu 2024	2
Tabel 2. Partai Lokal Peserta Pemilu 2024	2
Tabel 3. OSP PDI Perjuangan Provinsi Lampung	5
Tabel 4. Daftar Informan.....	31
Tabel 5. Struktur Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Periode 2019-2024	47
Tabel 6. Struktur Kepengurusan BMI Provinsi Lampung Periode 2019-2024.....	50
Tabel 7. Susunan Kepengurusan TMP Provinsi Lampung Periode 2019-2024 ...	51
Tabel 8. Struktur Kepengurusan BAMUSI Provinsi Lampung Periode 2019-2024	52
Tabel 9. Struktur Kepengurusan Repdem Provinsi Lampung Periode 2019-2024.	53
Tabel 10. Triangulasi Data Penelitian.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Hasil Pemilu PDI Perjuangan Tahun 2014, 2019, 2024	3
Gambar 2. Rekapitulasi Perolehan Kursi PDI Perjuangan Pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014,2019,2024	4
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4. Logo PDI Perjuangan	45
Gambar 5. Logo BM	49
Gambar 6. Logo TMP	51
Gambar 7. Logo BAMUSI.....	52
Gambar 8. Logo Repdem	53
Gambar 9. Pemberian Informasi Politik dari PDI Perjuangan Lampung kepada OSP terkait Pemilu 2024.....	60
Gambar 10. Agenda Ngopi Santai yang dilaksanakan PDI Perjuangan Lampung diikuti oleh OSP Repdem, BMI, dan TMP (23 Juni 2022).....	66
Gambar 11. Rakerda IV PDI Perjuangan Lampung (10 Agustus 2023).....	66
Gambar 12. BMI Lampung Peduli Korban Kebakaran (17 Juli 2022).....	67
Gambar 13. Dukungan yang diberikan PDI Perjuangan Lampung Melalui Rapat Koordinasi yang diikuti BMI, TMP, dan Repdem (15 Maret 2023).....	73
Gambar 14. Dukungan Finansial kegiatan Donor Darah TMP Provinsi Lampung	73
Gambar 15. DPD PDI Perjuangan Melaksanakan Rapat Rutin Membahas Pemilu 2024 (17 Februari 2023).....	80
Gambar 16. Peserta Rapat Rutin Membahas Persiapan Pemilu 2024 (17 Februari 2024)	80
Gambar 17. Rapat Koordinasi Optimalisasi Aplikasi MPP kepada kader PDI Perjuangan Lampung (24 Maret 2023)	85
Gambar 18. DPD PDI Perjuangan Membagikan Benih Padi Gratis di Lampung Tengah (11 Mei 2022).....	91
Gambar 19. Repdem bersama DPD PDI Perjuangan Lampung Melaksanakan Gerakan Menanam Pohon di Pesawaran (23 Januari 2022).....	91
Gambar 20. BMI Melaksanakan Kegiatan Kompetisi Futsal dan Modern Dance di GOR Kelapa Tujuh (13 Desember 2021)	92
Gambar 21. TMP Menggelar Turnamen Bola Voli di Lampung Selatan (2 November 2023).....	92
Gambar 22. Kegiatan BAMUSI Peduli Kaum Dhuafa (24 September 2020)	92
Gambar 23. Rapat Pleno Diperluas DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung (1 Maret 2023).....	99

Gambar 24. Diklat Pratama DPC PDI Perjuangan Lampung Utara dan Way Kanan (3 Juni 2022)	108
Gambar 25. Diklat Pratama DPC PDI Perjuangan Tanggamus (30 Mei 2022)..	108
Gambar 26. Diklat Pratama DPC PDI Perjuangan Metro dan Lampung Timur (18 Maret 2022).....	109
Gambar 27. Dokumen AD/ART PDI Perjuangan Periode 2019-2024 Pasal 6 dan 7 Mengatur Penugasan Anggota Partai	111
Gambar 28. Dokumen AD/ART PDI Perjuangan Periode 2019-2024 Pasal 8 dan 9 Mengatur Penugasan Kader di Lembaga Eksekutif dan Politik.....	112
Gambar 29. Penugasan yang diberikan PDI Perjuangan Provinsi Lampung Kepada Kader (24 maret 2023).....	112
Gambar 30. Diklat Madya DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung (27-29 Desember 2021)	118
Gambar 31. 3 Kader BMI Mengikuti Diklat Madya DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung	118
Gambar 32. Diklat Utama DPP PDI Perjuangan (15 November 2021).....	119
Gambar 33. Pembekalan Caleg DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung (27 Desember 2023)	123
Gambar 34. Kampanye Akbar di Lampung Selatan PDI Perjuangan Provinsi Lampung (22 Januri 2024).....	128
Gambar 35. DPD TMP Provinsi Lampung Mengikut Kegiatan Penanaman Mangrove dan Meninjau Taman Nasional Way Kambas (20 Agustus 2023)	128
Gambar 36. BAMUSI Ikut Memperingati Tahun Baru Islam 1445 DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung (21 Juli 2023).....	129
Gambar 37. Penyerahan Bibit Buah Alpukat Oleh Sekjen DPN Repdem kepada Kelompok Tani Binaan DPD Repdem Provinsi Lampung (26 Januari 2022)....	129
Gambar 38. BMI Lampung Utara Gelar Festival UMKM dan Ekonomi Kreatif (15-17Juni 2022).....	129

DAFTAR SINGKATAN

Pemilu: Pemilihan Umum

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

DPD: Dewan Perwakilan Daerah

DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KPU: Komisi Pemilihan Umum

OSP: Organisasi Sayap Partai

AD/ART: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

UUD: Undang-Undang Dasar

BMI: Banteng Muda Indonesia

TMP: Taruna Merah Putih

BAMUSI: Baitul Muslimin Indonesia

Repdem: Relawan Perjuangan Demokrasi

MPP: Media Pintar Perjuangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan cita-cita negara Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, kedaulatan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan aspirasinya, dan ikut berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan politik, salah satunya pemilihan umum (pemilu). Pelaksanaan pemilu di negara demokrasi merupakan sebuah implementasi kedaulatan rakyat digunakan untuk memilih seorang pemimpin eksekutif dan legislatif serta membentuk pemerintahan baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak merdeka, Indonesia telah menyelenggarakan sebanyak 12 kali pemilu. Terakhir yaitu pemilu 2024 yang memilih 5 (lima) jabatan politik, yaitu: Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten.

Pemilu 2024 merupakan agenda eletoral paling besar, paling rumit dan paling kompleks. Terdapat total 204,8 juta pemilih yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan sebanyak 24 partai politik sebagai peserta pemilu 2024, yang terdiri dari 17 partai nasional dan 7 partai lokal Aceh. (KPU, 2024). Jika disajikan dalam tabel, berikut ialah jumlah partai politik peserta pemilu 2024:

Tabel 1. Partai Nasional Peserta Pemilu 2024

No.Urut	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerindra
3	PDI Perjuangan
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelora
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Keadilan Nusantara (PKN)
10	Partai Hanura
11	Partai Garuda
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Perindo
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sumber: KPU (Data Diolah Peneliti, 2024)

Tabel 2. Partai Lokal Peserta Pemilu 2024

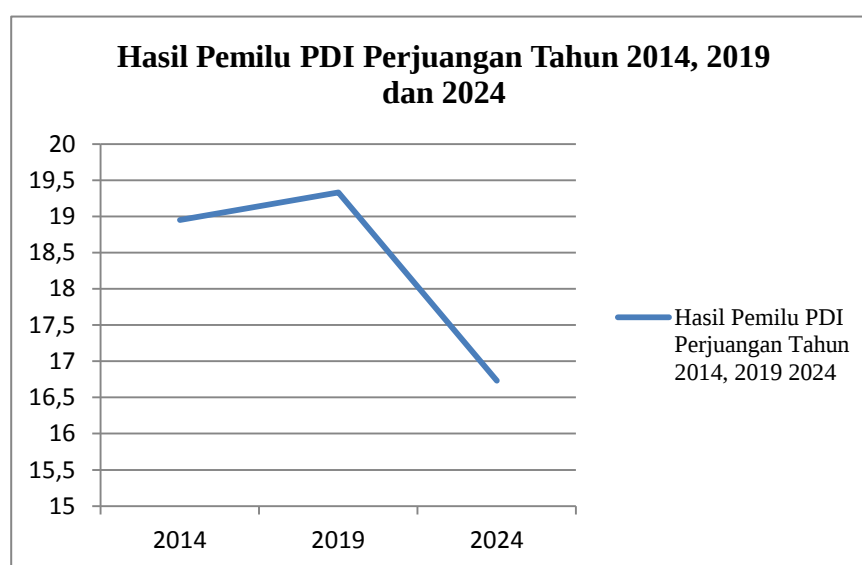
No.Urut	Partai Politik
18	Partai Aceh
19	Partai Adil Sejahtera Aceh
20	Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa
21	Partai Darul Aceh
22	Partai Nanggroe Aceh
23	Partai Solidaritas Independen Rakyat
24	Partai Gelora

Sumber: KPU (Data Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan kedua tabel diatas, terlihat bahwa sebanyak 24 partai politik ikut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024. Terdapat 4 partai baru yang ikut mewarnai pemilu kali ini, yaitu Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), dan Partai Garuda. Dari total 24 partai politik peserta pemilu 2024 terdapat 17 partai politik nasional dan 7 partai lokal Aceh. Dari 17 partai politik nasional, ada 9 partai politik parlemen atau partai yang lolos pada pemilu 2019. Sementara itu, ada 4

partai non-parlemen yang tidak lolos pemilu 2019. Salah satu partai politik yang berhasil lolos pada pemilu 2019 yaitu PDI Perjuangan.

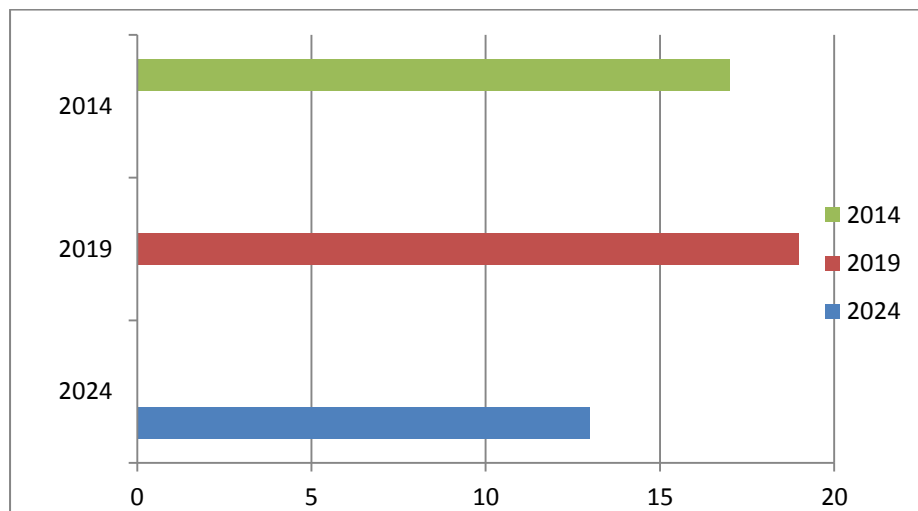
PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan selalu berhasil memperoleh cukup banyak suara pada setiap pemilu. Pada pemilu tahun 1999, PDI Perjuangan mampu mendapatkan perolehan suara sebesar 33.74% dari total suara dengan mendapat 153 kursi di DPR. (KPU, 2011). Perolehan suara ini berhasil untuk mengantarkan PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 1999. Kemenangan ini juga dianggap sebagai representasi perlawanan terhadap Orde Baru yang baru saja gugur pada tahun 1998. Akan tetapi, meski pada pemilu 1999 PDI Perjuangan mendapatkan kemenangan, pada pemilu 2004 PDI perjuangan justru gagal untuk mempertahankan posisinya. Kegagalan PDI Perjuangan ini disebabkan oleh ketidakmampuan partai untuk mengatasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) selama berkuasa di parlemen. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang merasa tidak puas atas kinerja PDI Perjuangan. Kondisi PDI Perjuangan yang mengalami naik turunnya perolehan suara juga terlihat pada 3 periode pemilu terakhir, yaitu tahun 2014, 2019 dan 2024. Berikut hasil perolehan suara PDI Perjuangan 3 periode pemilu terakhir jika disajikan dalam bentuk grafik.



Gambar 1. Grafik Hasil Pemilu PDI Perjuangan Tahun 2014, 2019, 2024
Sumber: KPU, Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan grafik di atas, bahwa perolehan suara PDI Perjuangan dari pemilu 2014 ke 2019 mengalami kenaikan. Akan tetapi, pada pemilu 2024 justru mengalami penurunan suara yang cukup signifikan. Dari data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada pemilu 2014 PDI Perjuangan memperoleh suara nasional sebesar 23.681.471 (18,95%), kemudian pemilu 2019 memperoleh suara sebesar 27.503.961 (19,33%). Terakhir pada pemilu 2024 PDI Perjuangan mengalami penurunan perolehan suara yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemilu 2019 yang hanya memperoleh suara sebesar 25.387.279 (16,37%) atau mengalami penurunan suara sebesar 6,16%. (KPU&CNBC, 2024).

Adanya tren penurunan suara PDI Perjuangan pada pemilu 2019 dan 2024 tidak hanya berdampak pada suara, tetapi juga pada jumlah kursi yang diperoleh pada pemilihan DPRD Provinsi Lampung tahun 2024. Berikut disajikan rekapitulasi jumlah perolehan kursi PDI Perjuangan pada pemilihan DPRD Provinsi Lampung tahun 2014-2024.



Gambar 2. Rekapitulasi Perolehan Kursi PDI Perjuangan Pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014,2019,2024

Sumber: KPU Provinsi Lampung, Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa juga terdapat penurunan perolehan kursi PDI Perjuangan pada kursi DPRD Provinsi Lampung selama 3 periode pemilu terakhir. Pada pemilu 2014, PDI Perjuangan mendapatkan 17 kursi, kemudian 2019 PDI Perjuangan mengalami peningkatan dengan memperoleh 19 kursi. Namun, tren peningkatan ini tidak berlanjut pada pemilu 2024, PDI Perjuangan mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan hanya meraih 13 kursi DPRD Provinsi. Penurunan ini menandakan bahwa adanya tantangan yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam mempertahankan konstituennya.

Meskipun berhasil untuk duduk di parlemen, penurunan perolehan suara yang cukup signifikan ini merupakan keadaan buruk yang harus dijalani oleh PDI Perjuangan. Salah satu penyebab penurunan perolehan suara yang cukup drastis ini dikarenakan masalah internal PDI Perjuangan. PDI Perjuangan harus mampu untuk membenahi keadaan partai, terutama internal partai. Menurut (Hidayah,E,N. 2010) bahwa salah satu pembenahan internal partai dilakukan dengan adanya Organisasi Sayap Partai (OSP). Hubungan antara partai dengan OSP menjadi studi yang menarik karena partai membangun hubungan dengan OSP bertujuan untuk menghubungkan partai dengan konsituennya (pemilih) yang selama ini belum terjangkau oleh partai. Baik DPP PDI Perjuangan hingga DPD PDI Perjuangan memiliki OSP yang membantu menjalankan fungsi-fungsi partai. Berikut ialah daftar OSP yang dimiliki PDI Perjuangan Provinsi Lampung:

Tabel 3. OSP PDI Perjuangan Provinsi Lampung

No	Nama OSP	Ketua
1	Banteng Muda Indonesia(BMI)	Piego Wiliyasa,S.T.,M.M
2	Taruna Merah Putih (TMP)	Hj. Nanda Indira,S.E.,M.M
3	Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)	Husaini,S.Sos
4	Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)	Napoleon Oxt. Bonaparte,S.H

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan data, PDI perjuangan Provinsi Lampung memiliki 5 OSP yang mempunyai tugas untuk melakukan pengorganisasian rakyat sesuai dengan jenis komintasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis partai. OSP yang dimiliki oleh PDI Perjuangan ini memiliki orientasi yang berbeda-beda, hal ini termaktub di setiap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing OSP. *Pertama*, BAMUSI dibentuk oleh PDI Perjuangan sebagai jejaring partai dan organisasi yang se-asas dan se-aspirasi di bidang keagamaan.

Kedua, BMI dibentuk berdasarkan tujuan untuk kaum muda khususnya pelajar dan bertugas untuk membentuk karakter kaum muda yang militan dan nasionalis yang nantinya dapat menjalankan visi dan misi PDI Perjuangan serta dapat membentuk kader yang kompeten dan mempunyai potensi. *Ketiga*, GANTI dibentuk untuk berfokus pada bidang agraria. *Keempat*, Repdem PDI perjuangan dibentuk untuk mengutamakan kaum muda diluar pelajar dan menjadi wadah bagi kader muda partai untuk menyalurkan aspirasi dan intelektualitas kader. *Kelima*, TMP merupakan organisasi sayap partai PDI Perjuangan yang berbasis kaum muda dan wawasan nasionalisme kebangsaan sebagai alat juang kaum muda PDI Perjuangan dalam rangka menjalankan visi misi partai bagi kepentingan rakyat. Dengan adanya 5 OSP yang dimiliki oleh PDI Perjuangan membawa harapan bahwa OSP mampu untuk membantu PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi partai di masyarakat serta mewujudkan cita-cita partai.

Menurut (Iswari, 2018) menyebutkan bahwa OSP memiliki peran yang cukup besar bagi partai politik dalam upaya implementasi, sosialisasi hingga diseminasi program dan kebijakan sebuah partai politik. Selain itu, OSP juga berperan besar dalam proses kaderisasi dan rekrutmen partai politik. Bahkan menjelang pemilu, OSP berperan untuk mencari dukungan politik bagi partai politik. Kemudian Yunita dalam (Wulandari, 2024) juga menyebutkan hal yang sama bahwa kehadiran OSP diperlukan oleh partai untuk menjaring kualitas dan kuantitas para pendukung untuk mendukung

partai politik, dukungan ini diperoleh dengan adanya bantuan dari OSP yang turun langsung ke masyarakat luas untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan partai politik melalui pemilu.

Selain sebagai salah satu alat untuk memperoleh kemenangan pada pemilu, peran OSP juga terlihat dalam komunikasi politik secara internal maupun eksternal partai politik, rekrutmen, seleksi pimpinan dan kader, edukasi politik, serta kontrol pemerintah yang dijalankan oleh partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan tugas OSP bergantung pada partai politik sebagai induk dari OSP itu sendiri. Dengan demikian, kehadiran OSP memiliki peran yang penting untuk membantu partai politik serta untuk menjalankan fungsi *linkage* partai politik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas mengapa *political linkage* PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024 tidak terjalin dengan baik.

Dalam melaksanakan sebuah penelitian diperlukan adanya penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian. Berikut peneliti cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dapat mendukung penelitian ini, yaitu:

Penelitian pertama oleh Isna Lukia Sidik (2021), penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana H. Supratman membangun *linkage*-nya dengan konstituen (pemilih dan organisasi lain) serta partai politik dalam perjalanannya di Pilkada 2020. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana konsep *political linkage* digunakan sebagai sebuah langkah strategi dalam memenangkan pilkada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa H. Supratman menggunakan 3 (tiga) strategi *linkage*, yakni; *Linkage Karismatik*, *Linkage Progmatic*; dan *Linkage Klientelistik*. Selain itu, H. Supratman juga memilih untuk melakukan manuver politik dengan yang awalnya maju sebagai kandidat independen menjadi tergabung bersama partai politik dengan alasan ketika maju bersama partai politik lebih

menguntungkan dirinya dalam proses pencalonan di Pilkada 2020 Kabupaten Pangandaran. H. Supratman juga menggunakan strategi *segmentasi voters* agar penyaluran sumberdaya politik dan pemobilisasian suara dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Reza Maulana (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pola keterkaitan dan bentuk strategi *political linkage* Koalisi Buruh Jakarta (BKJ) yang didefinisikan sebagai kekuatan politik dengan pasangan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan perolehan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pola keterkaitan yang kuat antara Koalisi Buruh Jakarta (BKJ) dengan partai pengusung Anies-Sandi yang menyebabkan BKJ secara terbuka mendukung Anies-Sandi. Keterkaitan politik ini didasari oleh *organisational linkage*, *participatory linkage*, dan *policy responsive linkage*. KBJ sebagai aktor intermediari antara pemilih (warga negara) dengan kandidat (Anies-Sandi) menggunakan strategi *clientelist linkage* dan *programatic linkage* untuk memenangkan Anies-Sandi. Namun, kondisi politik DKI Jakarta pada 2017 yang terpolarisasi membuat strategi *clientelist linkage* sulit diterapkan. Alhasil strategi tersebut bertransformasi menjadi strategi *programatic linkage*. Selain itu, KBJ sebagai mesin politik independen Anies-Sandi melakukan berbagai macam bentuk kontribusi, seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, dan memobilisasi massa. Eksperimen politik lokal buruh ini menjadi jalan alternatif bagi gerakan buruh dalam penuntutan kepentingan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Chairil Akbar Setiawan, *et.al* (2018), penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pola dan keterkaitan strategi politik AKP dan PKS dengan melacak *political linkage* antara PKS dan AKP. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *political linkage* antara AKP dan PKS termanifestasi pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

Pertama, Islam Politik yang diperjuangkan oleh Gerakan Ikhwanul Muslim. Kedua; PKS dan AKP berhasil untuk membangun jejaring sipil dan politik yang krusial. Ketiga; kompromi politik menjadi tidak terhindarkan melalui strategi elektoral yang kompromis dan pragmatis. Keduanya memiliki untuk menghadirkan wajah Islam yang plural dan terbuka. Ketiga hal yang mmebentuk keterkiatan politik antara PKS dan AKP perlu untuk digaribawahi. Bahwa antara AKP dan PKS hidup dalam lingkungan politik yang berbeda. Formasi politik nasional Turki dan Indonesia tidaklah sama persis.

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Muhammad Chairil Akbar Setiawan, dkk (2018). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pola dan keterkiatan strategi politik AKP dan PKS dengan melacak political linkage antara PKS dan AKP. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa political linkage antara AKP dan PKS termanifestasi pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu: Pertama, Islam Politik yang diperjuangkan oleh Gerakan Ikhwanul Muslim. Kedua; PKS dan AKP berhasil untuk membangun jejaring sipil dan politik yang krusial. Ketiga; kompromi politik menjadi tidak terhindarkan melalui strategi elektoral yang kompromis dan pragmatis. Keduanya memiliki untuk menghadirkan wajah Islam yang plural dan terbuka. Ketiga hal yang mmebentuk keterkiatan politik antara PKS dan AKP perlu untuk digaribawahi. Bahwa antara AKP dan PKS hidup dalam lingkungan politik yang berbeda. Formasi politik nasional Turki dan Indonesia tidaklah sama persis.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Devy Dhian Chayati, dkk (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara dan Yasti Soepredjo Mokoagow selaku Bupati Bolaang Mongondow dalam upaya membangun hubungan politik dalam konteks lokal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai

seorang pemimpin perempuan dan *political linkage*-nya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesuksesan mereka tidaklah lepas dari kemampuannya untuk membangun dan memelihara jaringan/relasi dengan aktor di berbagai aspek, seperti aktor ekonomi, masyarakat sipil dan aktor politik. Meskipun Rita dan Yasti menggunakan pola yang berbeda untuk membangun jaringan lokal, penelitian ini menunjukkan hal itu bahwa keterkaitan politik menjadi salah satu poin penting untuk membangun karir perempuan di politik. Yasti Mokoagow merupakan salah satu pemimpin perempuan kuat yang membangun hubungan politik. Keterkaitan yang dibangun ini terlihat dari jaringan birokrasinya, pengusaha, politisi di Sulawesi Utara, media massa dan organisasi masyarakat sipil. Sedangkan Rita memiliki kondisi yang berbeda, yaitu dirinya memiliki jaringan dengan memanfaatkan sosok figur ayahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterkaitan politik (*political linkage*) merupakan salah satu hal penting bagi perempuan yang ingin memantapkan karirnya di bidang politik. Pola *linkage* yang dibangun oleh Rita dan Yasti cenderung bersifat *klientelistik* melalui pertukaran materi dengan aktor lain.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam hal fokus pada *political linkage* partai politik serta kesamaan penggunaan metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup terlihat antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan ini lebih memfokuskan kepada *political linkage* PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: mengapa *political linkage* PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024 tidak terjalin dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak terjalinnya *political linkage* yang efektif antara PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam memahami dinamika keterlibatan generasi muda dalam partai politik. Memperkaya literatur yang ada mengenai OSP dalam konteks politik lokal, serta menambah bagaimana seharusnya linkage antara partai politik dengan OSP.

2. Secara Praktis

a. Bagi PDI Perjuangan

Penelitian ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan hubungan antara PDI perjuangan dan OSP. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, PDI Perjuangan dapat mengoptimalkan kembali koordinasi internal dengan OSP untuk memastikan bahwa OSP bekerja dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagi OSP

Penelitian ini dapat mengidentifikasi area-area dimana OSP perlu meningkatkan peran atau kontribusinya dalam mendukung PDI Perjuangan khususnya pada pemilu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Political Linkage*

2.1.1 Tinjauan Teoritis *Political Linkage*

Dalam teori demokrasi, adanya *linkage* diartikan sebagai pertautan atau kaitan antara partai politik dengan para pemilihnya (*voters*). Kemudian menurut K.Aarts (Fandi Nurohman, 2020) *linkage* diartikan sebagai jenis ikatan antara warga negara, organisasi sosial dan sistem politik. Ikatan atau elemen yang selalu melekat dalam *linkage* politik, yaitu: (1) warga negara; (2) aktor/institusi intermediari; (3) *linkage* urusan publik. Poguntke dan K.Aarts (Fandi Nurohman, 2020), mengilustrasikan hubungan antara partai politik dengan pemilih ini didorong oleh kebutuhan partai politik akan suara untuk memenangkan pemilu dan untuk mengamankan keberlangsungan hidup partai, terlepas dari apakah partai dimotivasi oleh pencari jabatan (*office-seeking*), pencarian suara (*vote-seeking*) atau orientasi kebijakan (*policy-seeking*).

Konsep dari *linkage* ini sendiri kerap kali dipakai oleh organisasi-organisasi politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial serta perannya terhadap demokrasi berkaitan dengan bagaimana organisasi tersebut bertindak sesuai dengan intermediari antara pemerintah dan warga negara. Kemudian menurut (Lawson, 1980), *political linkage* merupakan pola hubungan antara politisi dengan warga negara sebagai konstituennya (pemilih). Hubungan-hubungan antara partai, masyarakat dan negara yang secara umum membentuk sebuah ide dalam hal sosialisasi, komunikasi dan

rekrutmen. Hasil dari *linkage* berkaitan dengan ketiga ide-ide tersebut. Dari 3 (tiga) indikator dari keberhasilan linkage ini, jika dijabarkan lebih lanjut, yaitu:

1. Sosialisasi. Sosialisasi berfokus pada proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh OSP PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Menurut (Efriza, 2012) bahwa sosialisasi politik yang disampaikan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. Informasi atau Pesan Politik;
 - b. Pengetahuan Politik;
 - c. Pemberian Keyakinan dan Kepercayaan Politik.

2. Komunikasi. Komunikasi berfokus pada proses komunikasi yang dilakukan oleh OSP dengan PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Peneliti merujuk pada Mansfield dan Weaver (1982) dalam Cangara (2009:38) bahwa komunikasi politik terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:
 - a. Komunikator Politik;
 - b. Saluran atau Media Politik;
 - c. Sasaran atau Target Politik;
 - d. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik.

3. Rekrutmen. Rekrutmen berfokus pada bagaimana OSP melaksanakan proses rekrutmen anggota baru pada pemilu 2024. Penelitian ini berfokus pada 6 (enam) sub-aspek. Menurut Komarudin Sahid (2011) bahwa terdapat 6 (enam) langkah yang ditempuh partai politik dalam melaksanakan perekrutan kader-kader partai yang berkualitas di masa depan.

Penelitian ini akan berfokus pada 6 (enam) sub-aspek berdasarkan hal tersebut, yaitu:

- a. Rekrutmen Kader;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Kader Dasar;
- c. Penugasan;
- d. Pendidikan Kader Tingkat Lanjut;
- e. Kepeloporan;
- f. Pelibatan.

2.1.2 Jenis-Jenis *Political Linkage*

Menurut Clark (Fandi Nurohman, 2020), dalam menjalankan perannya *political linkage* partai politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Linkage Partisipatoris (*Participatory Linkage*)

Dalam konsep ini bahwa ketika partai politik bertindak sebagai agensi dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam politik.

2. Linkage Elektoral (*Electoral Linkage*)

Kondisi ketika seorang pemimpin partai politik mampu mengontrol beragam elemen dari proses elektoral.

3. *Policy Responsive Linkage*

Ketika partai politik bertindak sebagai agensi untuk meyakinkan bahwa pemerintahannya responsif terhadap rakyat atau pemilih.

4. Linkage Klientesitik (*Klientesitic Linkage*)

Ketika partai politik bertindak sebagai saluran penyokong (*channel*) dalam pertukaran suara yang diberikan oleh pemilih.

5. *Directive Linkage*

Kondisi dimana partai politik bertindak sebagai kontrol terhadap perilaku masyarakat. Dalam konsep demokrasi modern, *directive linkage* dianggap paling relevan untuk menjelaskan sebuah fakta di lapangan.

2.1.3 Faktor Yang Menyebabkan Kegagalan *Linkage*

Partai politik yang memiliki posisi sebagai intermediary aktor menunjukkan bahwa partai politik harus mampu untuk menjembatani antara kepentingan rakyat dengan negara. Berkaitan dengan posisi bahwa partai politik sebagai aktor dalam demokrasi representasi yang dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik kedalam kebijakan. Dengan demikian, partai politik menjadi aktor krusial dalam membentuk linkage sehingga mampu untuk membawa seluruh aspirasi masyarakat kedalam *agenda setting* kebijakan publik. Menurut (Lawson, 1980), terdapat faktor yang menyebabkan mengapa *linkage* gagal untuk dibangun, yaitu:

1. Adanya perbedaan kepentingan antara negara, partai politik dan masyarakat sehingga menimbulkan *gap* atau ketimpangan antar aktor.
2. Ketika partai politik lebih fokus kepada elektoral atau pemilu saja. Dalam artian ketika berada dalam tahapan pemilu, partai politik hanya akan berfokus pada langkah-langkah yang dilakukan untuk tujuan kemenangan, sehingga *linkage* politik tidak terbangun secara efektif.

2.1.4 Cara Merawat dan Membangun *Linkage*

Terdapat metode yang digunakan untuk merawat dan membangun linkage (Lawson, 1980), yaitu:

1. Metode *one-to-one*, metode ini diperuntukkan untuk isu-isu yang bersifat kurang terpublikasi seperti keyakinan, kepercayaan, dan adat-istiadat.
2. Metode *one-to-many*, metode ini digunakan untuk menjaring aspirasi terkait dengan isu-isu umum atau hanya sekedar untuk menampilkan hasil kerjanya.
3. Metode *many-to-many*, metode ini digunakan untuk memperkuat suara dari perwakilan satu dengan perwakilan lainnya yang merupakan input dari rakyat.

2.2 Partai Politik

2.2.1 Tinjauan Teoritis Partai Politik

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kemudian menurut (Amal, 1998), bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sekumpulan atau sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi dan memiliki tujuan dan pandangan yang sama untuk mewujudkan cita-cita bersama.

2.2.2 Fungsi Partai Politik

Secara umum partai politik memiliki fungsi, yaitu: sarana komunikasi politik, pemandu kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengendali konflik, partisipasi politik, dan sebagai sarana kontrol politik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Surbakti, 1992), yaitu:

1. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Menurut (Surbakti, 1992) dari segi penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

2. Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi, pemilihan, atau pengangkatans seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan beberapa peranan dalam sistem politik dan pemerintahan. Rekrutmen politik berfungsi sebagai sarana untuk mencari pemimpin dan melanjutkan kekuasaan untuk keberlangsungan hidup sistem politik.

3. Sarana Partisipasi Politik

Partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota atau masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai sebuah saluran kegiatan yang memengaruhi proses politik. Dengan demikian, partai politik sebagai wadah partisipasi politik.

4. Sarana Pemandu Kepentingan

Partai politik dibentuk untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda hingga yang bertentangan di masyarakat. Rangkaian ini terdiri dari kegiatan menampung, menganalisis, serta memadukan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan dan kemudian menjadi alternatif kebijakan umum yang selanjutnya diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Hal inilah yang disebut fungsi partai politik sebagai sarana pemandu kepentingan.

5. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat luas,, akan tetapi juga turut menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan secara efektif melalui partai politik

6. Sarana Pengendalian Konflik

Konflik yang terjadi dimasyarakat sangat bergama, mulai dari perbedaan pendapat hingga pertikaian fisik antar individu maupun antara individu dengan kelompok. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui berbagai cara seperti berdiskusi, berdialog, menampung, serta memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk kemudian dibawa ke dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7. Sarana Kontrol Politik

Menurut (Surbakti, 1992), kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam menjalankan kontrol politik atau pengawasan, partai politik harus memiliki tolak ukur yang jelas agar kegiatan bersifat relatif dan objektif.

2.3 Organisasi Sayap Partai

2.3.1 Tinjauan Teoritis OSP

Berdasarkan Pasal 12 Huruf (J) Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa, salah satu hak partai politik ialah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi Sayap Partai (OSP) didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk dan/atau menyatakan diri sebagai organisasi sayap partai politik sesuai dengan AD/ART masing-masing partai politik. OSP juga kerap kali dikenal sebagai *underbow* partai karena merupakan organisasi yang mendukung sebuah partai politik untuk bergerak pada ranah yang lebih mengakar di masyarakat.

2.3.2 Fungsi OSP

Menurut (Abd Hannan, 2021), atas dasar prinsip-prinsip tentang keterbukaan, keadilan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas maka salah satu fungsi penting OSP ialah bagaimana ikut berperan aktif dalam membangun organisasi kepartaian yang betul-betul mencerminkan semangat demokrasi. Kemudian jika melihat pentingnya kehadiran OSP nampak dari fungsi OSP merujuk pada Pasal 12 huruf (J) Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Udjaili, 2017), yaitu:

- a. Untuk membantuk mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang jadi kebutuhan pertumbuhan energi kritis secara partisipasi politik warga dalam kehidupan yang demokratis;
- b. Memberikan alternatif pemecahan atas bermacam permasalahan sosial yang dialami warga, paling utama yang berhubungan dengan pelayanan publik yang jadi urusan hidup bersama;
- a. Memberikan sokongan (advokasi) kepada warga supaya mempunyai keberanian untuk menggunakan serta menegakkan hak-hak politik ataupun hak-hak yang lain yang dimiliki;
- b. Mendorong perubahan kearah yang lebih baik, terutama dalam hal paradigma berpikir serta perilaku mental (*mental attitude*) yang baik, untuk upaya kemajuan pertumbuhan partai politik dan pencapaian keadilan sosial untuk seluruh warga Indonesia.

2.3.3 Peran Strategis OSP

Dalam optik keilmuan, setidaknya terdapat 2 peran strategis OSP (Septi Nur Wjiaya, 2021), yaitu:

- a. Organisasi sayap partai politik sangat strategis dalam menghubungkan antara partai politik dengan kelompok pemilih yang dapat berbentuk organisasi perempuan, pemuda ataupun

mahasiswa, serikat buruh, organisasi keagamaan dan organisasi sosial yang lain;

- b. Peran organisasi sayap partai politik dapat membantu peran partai politik dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan aspirasi masyarakat atau dapat juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik.

2.4 Pemilihan Umum

2.4.1 Tinjauan Teoritis Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedualatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan sebuah proses untuk melahirkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Nisa Nabila, 2020). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan sebuah cara atau alat untuk memilih dan menentukan wakil-wakil yang akan memimpin dan melanjutkan roda pemerintahan.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Menurut (Prihatmoko, 2003), dalam pelaksanaannya pemilu memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- a. Sebagai mekanisme pemilihan pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik;
- b. Pemilu merupakan pengalihan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-

wakil terpilih atau partai-partai yang memenangkan kursi sehingga terjamin integritasnya;

- c. Pemilu merupakan sarana untuk memobilisasi atau menggalang dukungan rakyat bagi negara dan pemerintah dengan berpartisipasi dalam proses politik.

Kemudian menurut (Kansil, 2001), bahwa sebagai alat ukur demokrasi pemilu memiliki fungsi, yaitu:

- a. Memelihara dan mengembangkan dasar-dasar demokrasi di Indonesia;
- b. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- c. Menjamin keberhasilan perjuangan Orde Baru yaitu penegakan Pancasila dan pelestarian UUD 1945.

2.4.3 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, terdapat asas-asas yang menjadi dasar dalam melaksanakan proses pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas-asas tersebut yaitu:

- a. Langsung, artinya masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memilih secara langsung calon wakil pemimpin dalam pemilu sesuai dengan keinginan sendiri dan tanpa paksaan pihak manapun.
- b. Umum, artinya pemilu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, dll.
- c. Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih bebas untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk menyalurkan aspirasinya dan melanjutkan roda pemerintahan.

- d. Rahasia, artinya dalam menentukan pilihannya pemilih harus merahasiakan pilihannya. Pemilih menyalurkan suaranya pada surat suara yang tidak dapat diketahui oleh pihak manapun;
- e. Jujur, artinya seluruh pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak secara jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu seluruh pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.5 Kerangka Pikir

Bagian kerangka berpikir ini secara menyeluruh menggambarkan *political linkage* PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024.

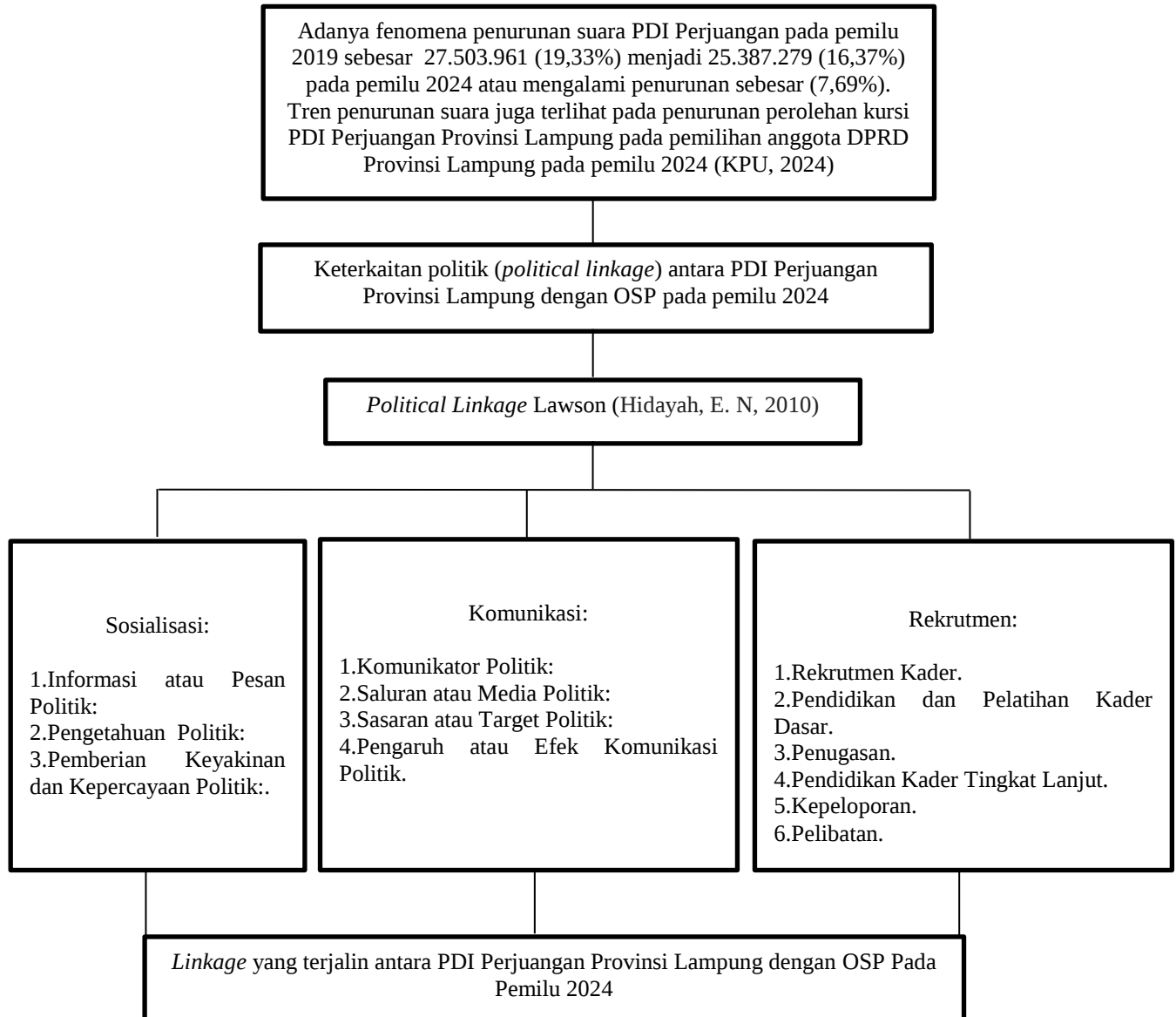
Bagian pertama menjelaskan bahwa Adanya fenomena penurunan suara PDI Perjuangan pada pemilu 2019 sebesar 27.503.961 menjadi 25.387.279 pada pemilu 2024 atau mengalami penurunan sebesar (16,37%). Tren penurunan suara juga terlihat pada penurunan perolehan kursi PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Lampung pada pemilu 2024 (KPU, 2024). Salah satu penyebab penurunan perolehan suara yang cukup drastis ini dikarenakan masalah internal PDI Perjuangan (Yunanto,2024). PDI Perjuangan harus mampu untuk membenahi keadaan partai, terutama internal partai. (Erlin Nur Hidayah, 2010) menyebutkan bahwa salah satu pembenahan internal partai dilakukan dengan adanya OSP. Tentu hal ini menarik untuk dibahas karena OSP merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari partai politik. OSP berperan untuk membantu partai dalam menjalankan fungsinya. Kemudian bagian kedua, dipaparkan bagaimana keterkaitan politik (*political linkage*) antara OSP dengan PDI Perjuangan Provinsi Lampung sebagai induk OSP itu sendiri. Penelitian ini memfokuskan pada *political linkage* oleh Lawson (Hidayah,E.N, 2010) sebagai landasan teoritis untuk menganalisis

political linkage OSP dengan PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pemilu 2024.

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) indikator dalam *Political Linkage* oleh Lawson (Hidayah,E.N, 2010) yang menjadi hasil dari linkage, yaitu Sosialisasi, Komunikasi dan Rekrutmen. Sosialisasi: Pada aspek ini, penelitian akan berfokus tentang bagaimana proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh OSP PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Menurut (Efriza, 2012), bahwa sosialisasi politik yang disampaikan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat terdiri dari 3 aspek, yaitu: Informasi atau Pesan Politik, Pengetahuan Politik, dan Pemberian Keyakinan dan Kepercayaan Politik. Komunikasi: Komunikasi. Berfokus pada proses komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan OSP pada pemilu 2024. Pada aspek ini, peneliti merujuk pada Mansfield dan Weaver (1982) dalam (Cangara, 2011) bahwa komunikasi politik terdiri atas 4(empat) unsur, yaitu: Komunikator Politik, Saluran Atau Media Politik, Sasaran Atau Target Politik, Dan Pengaruh Atau Efek Komunikasi Politik. Indikator terakhir yaitu Rekrutmen. Rekrutmen berfokus pada bagaimana PDI Perjuangan melaksanakan rekrutmen anggota baru untuk OSP pada pemilu 2024. Penelitian ini berfokus pada 6 (enam) sub-aspek. Menurut (Sahid, 2015), bahwa terdapat 6 (enam) langkah yang ditempuh partai politik dalam melaksanakan perekrutan kader-kader partai yang berkualitas di masa depan. Penelitian ini akan berfokus pada 6 (enam) sub-aspek berdasarkan hal tersebut, yaitu: Rekrutmen Kader, Pendidikan dan Pelatihan Kader Dasar, Penugasan, Pendidikan Kader Tingkat Lanjut, Kepeloporan, dan Pelibatan.

Pada bagian terakhir dari bagan ini, menunjukkan output yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu melihat *linkage* yang terjalin antara PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP PDI Perjuangan pada

pemilu 2024. Jika digambarkan dalam bagan, berikut kerangka berpikir penelitian ini:



Gambar 3. Kerangka Pikir
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Moleong, 2007), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara *holistic* dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut (Abdussamad, 2021) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Kemudian menurut (Sukmadinata, 2021), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deksripitf kualitatif tidak hanya menghadirkan perlakuan, manipulasi maupun pembaruan pada variabel-variabel yang akan diteliti, akan tetapi mengilustrasikan suatu keadaan yang apa adanya.

Peneliti telah melaksanakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif karena pendekatan yang mendalam, dimana penelitian kualitatif mampu untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang bagaimana *political linkage* PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024. Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan metode penelitian yang deskripsinya tidak terbatas pada angka-angka, karena peneliti menemukan berbagai kenyataan yang kompleks selama proses penelitian. Banyaknya kenyataan dan fakta yang ditemukan di lapangan menjadikan setiap informasi sebagai data penting yang menjadi kunci dalam menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, jenis penelitian kualitatif deskriptif dianggap sangat tepat untuk penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut (Abdussamad, 2021), masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan dengan fokus masalah atau fokus penelitian. Selanjutnya menurut (Sugiyono, 2010), fokus penelitian merupakan batasan dalam penelitian yang sifatnya umum. Pada penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang akan didapat dari situasi sosial atau lapangan. Fokus penelitian merupakan sekumpulan pernyataan dengan indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Rincian dari aspek yang akan diteliti ini kemudian akan bermanfaat untuk memberikan arah serta memperjelas jalinan fenomena yang akan diteliti.

Fokus penelitian bersifat abstrak, artinya dapat berubah sesuai dengan situasional penelitian. Penerapan fokus penelitian dan pembatasan pengumpulan data memberikan manfaat dalam proses reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan pra-analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah.

Adapun fokus penelitian ini *political linkage* organisasi sayap partai PDI Perjuangan dalam pemilu 2024. Objek spesifik penelitian ini mencakup 3 (tiga) aspek utama dari *political linkage* antara organisasi sayap partai PDI Perjuangan pada pemilu 2024, antara lain:

1. Sosialisasi: Pada aspek ini, penelitian akan berfokus tentang bagaimana proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan kepada OSP pada pemilu 2024. Menurut (Efriza, 2012), bahwa sosialisasi politik yang disampaikan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat terdiri dari 3 aspek, yaitu:
 - a. Informasi atau Pesan Politik: Penelitian ini menganalisis bagaimana PDI Perjuangan memberikan informasi politik berkaitan dengan strategi dan kampanye kepada OSP pada pemilu 2024.
 - b. Pengetahuan Politik: Sub-aspek ini akan menganalisis bagaimana PDI Perjuangan memberikan pemahaman akademis terhadap fenomena politik, artinya fenomena politik diberikan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum pendidikan OSP pada pemilu 2024. Sub-aspek ini mencakup analisis pemberian pengetahuan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Provinsi Lampung.
 - c. Pemberian Keyakinan dan Kepercayaan Politik: Penelitian ini mengkaji bagaimana PDI Perjuangan memberikan dukungan moral dan emosi kepada OSP terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan profesional, kepastian bahwa partai politik berperilaku sesuai dengan integritas dan menjaga amanah, serta harapan bahwa

partai politik bertindak atas kepentingan umum pada pemilu 2024.

2. Komunikasi. Berfokus pada proses komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan OSP pada pemilu 2024. Pada aspek ini, peneliti merujuk pada Mansfield dan Weaver (1982) dalam (Cangara, 2011) bahwa komunikasi politik terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:
 - a. Komunikator Politik: Fokus ini akan meneliti bagaimana PDI Perjuangan sebagai pemberi informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik, kebijakan dan strategi pemilu 2024 kepada OSP.
 - b. Saluran atau Media Politik: Penelitian ini akan melihat apa saluran atau media politik yang digunakan oleh PDI Perjuangan dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada OSP pada pemilu 2024, seperti media *Instagram* dan *website*.
 - c. Sasaran atau Target Politik: Sub-aspek ini akan melihat bagaimana masyarakat Provinsi Lampung sebagai sasaran atau target politik dari *linkage* yang dibangun antara PDI Perjuangan dengan OSP sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk suara (*vote*) pada PDI Perjuangan pada pemilu 2024.
 - d. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik: Penelitian ini akan melihat bagaimana akhirnya terciptanya OSP yang mendapatkan pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, sehingga menimbulkan dampak politik seperti dukungan suara dan memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan.

3. Rekrutmen. Rekrutmen berfokus pada bagaimana PDI Perjuangan melaksanakan rekrutmen anggota baru untuk OSP pada pemilu 2024. Penelitian ini berfokus pada 6 (enam) sub-aspek. Menurut (Sahid, 2015), bahwa terdapat 6 (enam) langkah yang ditempuh partai politik dalam melaksanakan perekrutan kader-kader partai yang berkualitas di masa depan. Penelitian ini akan berfokus pada 6 (enam) sub-aspek berdasarkan hal tersebut, yaitu:

- a. Rekrutmen Kader. Sub-aspek ini merupakan tahap awal dari penentuan calon kader OSP melalui seleksi yang berdasar pada kriteria yang telah ditentukan oleh PDI Perjuangan dan AD/ART masing-masing OSP. Misalnya: WNI yang telah berumur 17 tahun dan/atau sudah menikah, bersedia mematuhi Piagam Perjuangan. Mukadimah, AD/ART, Peraturan Partai, dll.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Kader Dasar. Sub-aspek ini akan meneliti bagaimana PDI Perjuangan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader dasar untuk kader OSP guna melahirkan kader organisasi yang berkualitas dan membantu partai pada pemilu 2024.
- c. Penugasan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada kader OSP setelah melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader dasar.
- d. Pendidikan Kader Tingkat Lanjut. Sub-aspek ini akan mengkaji bagaimana PDI Perjuangan memberikan pendidikan kader tingkat lanjut kepada kader OSP. Cara ini digunakan oleh PDI Perjuangan setelah melihat kader yang bersangkutan menjalani proses penugasan.

- e. Kepeloporan. Sub-Aspek ini akan meneliti bagaimana cara PDI Perjuangan menempatkan kader OSP di sektor politik atau pemerintahan, seperti menempatkan kader OSP dalam pemilihan legislatif.
- f. Pelibatan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kader OSP dilibatkan secara langsung dalam acara-acara PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pemilu 2024.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut (Suwama, 2015), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan atas pertimbangan kemenarikan, keunikan, serta kesesuaian topik yang dipilih. Menurut (Nasution, 2003), menjelaskan bahwa lokasi penelitian merujuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan dengan adanya 3 unsur, yaitu: pelaku tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi penelitian ini yaitu Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang terletak di Jl. P. Emir Moh.Noer No.57, Pengajaran, Kec.Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Menurut (Moleong, 2010), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Dalam penelitian ini, menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Menurut (Bungin, 2017), data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil wawancara informan, hasil observasi kegiatan dan program OSP PDI Perjuangan Provinsi

Lampung pada pemilu 2024, dan hasil dokumentasi di kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh OSP.

2. Data Sekunder

Menurut (Hasan, 2002), data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data primer ini dapat berupa bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku, jurnal

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak terdapat istilah pengambilan sampel dan populasi, karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Akan tetapi, penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang mendalam dari masalah penelitian yang dipilih. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut (Rahmadi, 2011), teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang paling dianggap ahli atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4. Daftar Informan

No	Jabatan	Instansi	Nama
1	Sekretaris	PDI Perjuangan Provinsi Lampung	Ir. Sutono,M.M
2	Ketua BAMUSI	BAMUSI Provinsi Lampung	Husaini,S.Sos
3	Ketua BMI	BMI Provinsi Lampung	Piego Wiliyasa,S.T.,M.M
4	Ketua Repdem	Repdem Provinsi Lampung	Napoleon Bonaparte,S.H
5	Sekretaris TMP	TMP Provinsi Lampung	Lesty Putri Utami,S.H.,M.Kn
6	Pengamat Politik	FISIP Universitas Lampung	Himawan Indarajat, S.IP.,M.Si

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Abdussamad, 2021), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Kemudian menurut (Creswell, 2010), upaya dalam mengumpulkan data mencakup upaya untuk membuat batasan dalam penelitian, menghimpun informasi dengan metode wawancara maupun observasi secara terstruktur atau tidak, dan melalui dokumentasi, materi, visual, serta usaha lainnya dalam merancang aturan untuk dapat mencatat/merekam informasi yang diperlukan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti telah melakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi, tahapan yang telah peneliti laksanakan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut (Adhandayani, 2020), wawancara merupakan komunikasi yang melibatkan dua arah antara kedua belah pihak dan adanya tujuan yang akan dicapai melalui komunikasi tersebut. Kemudian menurut (Kawasati, 2009), wawancara bertujuan untuk merekam pendapat, makna perasaan, emosi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan individu dalam suatu organisasi. Melalui teknik wawancara peneliti dapat memperoleh data penelitian yang lebih luas dan mendalam, sehingga peneliti dapat memahami budaya informan melalui bahasa dan ekspresi orang yang diwawancarai; dan dapat mengklarifikasi informasi yang tidak diketahui.

Peneliti telah melaksanakan wawancara kepada informan penelitian selama 1 bulan terhitung dari tanggal 10 Januari-10 Februari 2025 di DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

2. Observasi

Menurut (Herdiansyah, 2010), bahwa observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Zinal Arifin dalam (Kristanto, 2018) bahwa observasi adalah proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

Adapun tujuan dan fungsi dari kegiatan observasi menurut (Kawasati, 2009), bahwa tujuan dari observasi berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian kualitatif) atau menguji hipotesis (pada penelitian kuantitatif). Sementara fungsi kegiatan observasi yaitu terdiri dari deskripsi untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang terjadi; mengisi data atau melengkapi informasi ilmiah atas gejala sosial yang diteliti berdasarkan teknik-teknik penelitian; serta memberikan data yang dapat digeneralisasikan dalam seluruh kegiatan penelitian. Dari teknik observasi, data yang diperoleh berkaitan dengan:

- a. Kegiatan sosialisasi yang diberikan PDI Perjuangan Provinsi Lampung kepada OSP mulai dari informasi politik, pengetahuan politik, pemberian keyakinan dan kepercayaan politik;
- b. Kegiatan komunikasi yang dijalin PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP, seperti sebagai komunikator politik, media politik yang digunakan PDI Perjuangan, program kegiatan yang dilaksanakan OSP;
- c. Kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Provinsi Lampung, pelaksanaan diklat, pemberian penugasan, kepeloporan, dan pelibatan OSP dalam kegiatan PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Menurut (Abdussamad, 2021), mendefinisikan dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, *legger*, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian merupakan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian serta dibutuhkan untuk melengkapi data-data.

Terdapat berbagai macam jenis dokumen yang dapat digunakan untuk melengkapi data dalam penelitian kualitatif. Moelong dalam (Herdiansyah, 2010) mengemukakan bahwa terdapat 2 bentuk dokumen yang dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, yaitu:

- a. Dokumen pribadi, merupakan catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Tujuan dari penggunaan dokumen pribadi ialah untuk memperoleh sudut pandang orisinil dari kejadian situasi nyata.
- b. Dokumen resmi, dibagi menjadi 2 yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat pimpinan, dan sebagainya. Kemudian dokumen eksternal berupa bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran, buletin, dan surat pernyataan.

Dokumen yang berhasil peneliti himpun dari teknik dokumentasi, yaitu:

- a. Dokumen AD/ART PDI Perjuangan
- b. Dokumen SK Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung
- c. Dokumen SK Kepengurusan DPD BMI Provinsi Lampung
- d. Dokumen SK Kepengurusan DPD TMP Provinsi Lampung

- e. Dokumen SK Kepengurusan DPD BAMUSI Provinsi Lampung
- f. Dokumen Peserta Diklat Madya DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung
- g. Dokumentasi kegiatan-kegiatan OSP PDI Perjuangan dalam rangka pemilu 2024.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu pengolahan data. Menurut Efendi,*et.al* dalam (Singarimbun, 2008) bahwa teknik pengolahan data terdiri dari:

a. *Editing* Data

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan faktor data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan menyesuaikannya pada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam pedoman wawancara, serta memilah dan menentukan data yang relevan diperlukan untuk penelitian. Mengolah kegiatan observasi yaitu penulis mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat dipaparkan dengan baik. Proses editing data yang telah peneliti lakukan yaitu melakukan *editing* data hasil wawancara menjadi data hasil penelitian.

b. Interpretasi Data

Pada tahap ini, peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses *editing* data sesuai dengan faktor penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara menggabungkan hasil analisis data yang diperoleh dan dibedakan berdasarkan dengan kriteria pertanyaan ataupun hal khusus lainnya. Dalam pelaksanaan proses interpretasi data mula-mula dilaksanakan dengan memberi

penjelasan yang berupa kalimat narasi dan deskriptif. Data yang kemudian mempunyai makna akan dilakukan analisis data dan dibahas sehingga penulis dapat menghasilkan kesimpulan dari hasil penelitian.

Peneliti juga melakukan interpretasi penulisan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, kemudian penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak melahirkan kesan yang merugikan banyak pihak. Hasil dari penelitian ini kemudian akan dijabarkan secara lengkap pada bagian lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga akan dilakukan dengan cara menampilkan data yang sudah diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia yang diperoleh penulis dari informan. Kata-kata yang digunakan akan dipilih sehingga tidak merugikan banyak pihak.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Saleh, 2017). Pada penelitian ini menggunakan model analisis data oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019) , yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum dan memilah data-data pokok yang sudah dipertimbangkan sebagai data penting. Proses reduksi data penting untuk dilakukan dalam penelitian

karena mengingat data yang diperoleh dari proses pengumpulan data cukup banyak dan beragam.

Data yang telah diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan para informan, dokumentasi kegiatan OSP PDI Perjuangan serta hasil observasi langsung dikelompokkan sesuai dengan instrumen penelitian kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif juga dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan (Sugiyono, 2019). Tujuan dari penyajian data ialah untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang dilakukan.

Bentuk dari penyajian data dari penelitian ini yaitu dengan melampirkan hasil wawancara berupa kutipan-kutipan langsung. Penyajian data dilakukan secara deskriptif yang mendeskripsikan *Political Linkage* Organisasi Sayap Partai PDI Perjuangan Pada Pemilu 2024. Kemudian, penyajian data pada penelitian ini juga dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya untuk memudahkan dalam memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menurut (Rijali, 2018), penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Penelitian kualitatif menghasilkan kesimpulan yang bersifat orisinal yang

sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini berupa penjelasan deskripsi tentang objek yang sebelumnya masih bersifat abu-abu, hubungan antara sebab dan akibat, interaktif dan yang terakhir teori. Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data.

Peneliti akan melakukan peninjauan akan data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan teori yang menjadi landasan teoritis untuk menjawab rumusan masalah serta memenuhi tujuan penelitian. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan ditampilkan. Dalam proses pembuatan kesimpulan/verifikasi ini dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa di lakukan (*why*), dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*). Peneliti menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana *political linkage* organisasi sayap partai PDI Perjuangan pada pemilu 2024.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kualitatif menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk menghasilkan sebuah data yang reliabel dan valid. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Triangulasi Metode

Menurut (Haryoko, 2020), bahwa triangulasi metode berarti mengecek data melalui sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti melakukan triangulasi metode melalui 3 jenis pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.

IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum *Political Linkage*

Dalam teori demokrasi, adanya *linkage* diartikan sebagai pertautan atau kaitan antara partai politik dengan para pemilihnya (*voters*). Kemudian menurut K.Aarts (Fandi Nurohman, 2020) *linkage* diartikan sebagai jenis ikatan antara warga negara, organisasi sosial dan sistem politik. Ikatan atau elemen yang selalu melekat dalam *linkage* politik, yaitu: (1) warga negara; (2) aktor/institusi intermediari; (3) *linkage* urusan publik. Poguntke dan K.Aarts (Fandi Nurohman, 2020), mengilustrasikan hubungan antara partai politik dengan pemilih ini didorong oleh kebutuhan partai politik akan suara untuk memenangkan pemilu dan untuk mengamankan keberlangsungan hidup partai, terlepas dari apakah partai dimotivasi oleh pencari jabatan (*office-seeking*), pencarian suara (*vote-seeking*) atau orientasi kebijakan (*policy-seeking*).

Konsep dari *linkage* ini sendiri kerap kali dipakai oleh organisasi-organisasi politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial serta perannya terhadap demokrasi berkaitan dengan bagaimana organisasi tersebut bertindak sesuai dengan intermediari antara pemerintah dan warga negara. Kemudian menurut (Lawson, 1980), *political linkage* merupakan pola hubungan antara politisi dengan warga negara sebagai konstituennya (pemilih). Hubungan-hubungan antara partai, masyarakat dan negara yang secara umum membentuk sebuah ide dalam hal sosialisasi, komunikasi dan rekrutmen. Hasil dari *linkage*

berkaitan dengan ketiga ide-ide tersebut. Dari 3 (tiga) indikator dari keberhasilan *linkage* ini, jika dijabarkan lebih lanjut, yaitu:

1. Sosialisasi. Sosialisasi berfokus pada proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh OSP PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Menurut (Efriza, 2012) bahwa sosialisasi politik yang disampaikan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. Informasi atau Pesan Politik;
 - b. Pendidikan Politik;
 - c. Pemberian Keyakinan dan Kepercayaan Politik.
2. Komunikasi. Komunikasi berfokus pada proses komunikasi yang dilakukan oleh OSP dengan PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Peneliti merujuk pada Mansfield dan Weaver (1982) dalam Cangara (2009:38) bahwa komunikasi politik terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:
 - a. Komunikator Politik;
 - b. Saluran atau Media Politik;
 - c. Sasaran atau Target Politik;
 - d. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik.
3. Rekrutmen. Penelitian ini berfokus pada 6 (enam) sub-aspek. Menurut Komarudin Sahid (2011) bahwa terdapat 6 (enam) langkah yang ditempuh partai politik dalam melaksanakan perekrutan kader-kader partai yang berkualitas di masa depan. Indikator tersebut, ialah:
 - a. Rekrutmen Kader;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kader Dasar;
 - c. Penugasan;
 - d. Pendidikan Kader Tingkat Lanjut;
 - e. Kepeloporan;
 - f. Pelibatan.

4.2 Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)

4.2.1 Sejarah PDI-Perjuangan

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Sejarah munculnya PDI Perjuangan berhubungan erat dengan dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Soekarno pada tahun 1927. Hubungan ini dimulai pada masa Orde Baru ketika Soeharto membuat kebijakan penggabungan 5 (lima) partai politik, yaitu Partai Kristen Indonesia (Parkindo), PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katholik, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Kebijakan ini mengundang tokoh dari kelima partai politik diatas untuk kemudian dideklarasikan menjadi satu partai, yaitu PDI Perjuangan pada 10 Januari 1973. (Andi, 2021)

Sejak awal, pembentukan partai ini tidak berjalan lancar karena terdapat konflik internal yang kemudian diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Kongres nasional yang seharusnya dilaksanakan pada awal terbentuknya partai harus tertunda sampai 3 (tiga) tahun lamanya, hingga akhirnya kongres pertama PDI dapat dilaksanakan pada tahun 1976. Melalui kongres ini, Sanusi Hardjadinata ditunjuk sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI.

Meskipun masih terdapat konflik internal partai, kongres nasional tetap berlanjut hingga kongres ke-IV yang dilaksanakan di Medan tahun 1993. Kongres ke-IV ini menunjuk Soejardi sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Penunjukan ketua umum ini di tentang oleh seluruh warga PDI dan dianggap gagal. Kegagalan kongres ini kemudian muncul nama Megawati Soekarno Putri yang dibincangkan sebagai ketua umum. Hingga pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati Soekarno Putri melaksanakan mimbar

demokrasi di halaman kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro No. 58 Jakarta Pusat. Kemudian datanglah rombongan kaos merah kubu Soejardi yang selanjutnya terjadi bentrok dengan kubu Megawati Soekarno Putri. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Kerusuhan 27 Mei atau dikenal dengan Peristiwa Kuda Tuli.

Setelah terjadinya Peristiwa Kuda Tuli, pada Kongres ke-V yang dilaksanakan di Denpasar, Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003. Agar dapat mengikuti pemilu 1999, Megawati kemudian mengubah nama yang mulanya PDI menjadi PDI-Perjuangan. Perubahan nama ini disahkan oleh notaris Rahmat Syamsul Rizal dan selanjutnya dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Semenjak saat itu, dibawah kepemimpinan Megawati PDI Perjuangan telah menjadi partai yang besar dan memenangkan pemilu. Kepemimpinan Megawati masih terus berlanjut sampai dilaksanakannya kongres yang mengukuhkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020.

4.2.2 Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

PDI Perjuangan mempunyai visi partai untuk mencapai tujuan yang diinginkan partai di masa depan dan menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan Pasal 6 AD/ART PDI Perjuangan Tahun 2019-2024, bahwa partai adalah:

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);

- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa peolpor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Misi

Misi partai merupakan muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai. Sebagaimana diamantkan dalam pasal 7 dan 8 Anggaran Dasar Partai.

Tujuan Umum

Berdasarkan pasal 7 AD PDI Perjuangan, bahwa partai memiliki tujuan umum, yaitu:

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai NKRI yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berpribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Khusus

Berdasarkan pasal 8 AD PDI Perjuangan, bahwa partai memiliki tujuan khusus, yaitu:

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kedaulatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan;
- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat UUD Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945.

4.3 Gambaran Umum DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung

4.3.1 Logo Organisasi



Gambar 4. Logo PDI Perjuangan

Sumber: Wikipedia

(https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan)

Filosofi Logo

- a. Logo PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah didalam lingkaran bergaris hitam dan putih.
- b. Warna dasar merah melambangkan berani dalam mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
- c. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.
- d. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
- e. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus.

4.3.1 Profil Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung

DPD PDI Perjuangan merupakan pelaksana eksekutif partai di tingkat provinsi. Merujuk pada Pasal 25 Ayat 3 AD/ART PDI Perjuangan, DPD memiliki wewenang dan kewajiban untuk:

- a. Menumbuh kembangkan, memantapkan, dan membina partai di wilayah provinsi.
- b. Memantapkan persatuan dan kestuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di tingkat provinsi
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan kegiatan partai di tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Mengesahkan struktur, komposisi dan personalia pengurus DPC partai di kabupaten/kota.
- e. Melaksanakan program kerja partai di wilayahnya.
- f. Membentuk fraksi dan menetapkan pengurus fraksi DPRD Provinsi.
- g. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- h. Menyelenggarakan Konferensi Cabang Partai dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Konferensi Cabang Partai.
- i. Memutuskan dengan dan atas persetujuan DPD Partai dan persetujuan DPP Partai untuk menarik kembali petugas partai yang mewakili partai di lembaga negara (eksekutif dan legislatif) tingkat provinsi.
- j. Menetapkan pengurus fraksi partai di DPRD Provinsi.
- k. Menetapkan petugas partai, baik di dalam lembaga negara maupun organisasi lain di tingkat provinsi.

Struktur Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Periode 2019 2024

Tabel 5. Struktur Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Periode 2019-2024

No	Jabatan	Nama
1	Sudin,S.E	Ketua
2	Kol.TNI. Marzuki,S.Sos.,M.Si	Purn. Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
3	Umar Ahmad,S.P	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
4	H. Watoni Noerdin,S.H.,M.H	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi
5	Dr. H. Yanuar Irawan,S.E.,MM	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi
6	Sahlan Syukur,S.E	Wakil Ketua Bidang Politik
7	I Gede Sudiarmaja,S.H.,M.H	Wakil Ketua Hukum, HAM dan Perundang-Undangan
8	Toni Wijaya,S.E.,MM	Wakil Ketua Bidang Perekonomian
9	Dra.Hj. May Sari Berty,M.M	Wakil Ketua Bidang Kebudayaan
10	Budhi PS Condrowati,S.E	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana
11	AKBP (Purn) Drs. H. Cik Raden.,MM	Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, dan Jaminan Sosial
12	Hj. Eva Dwiana,S.E	Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak
13	Deddy Wijaya Chandra,S.Kom	Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
14	Lesty Putri Utami,S.H.,M.Kn	Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM
15	H.M. Habib Purnomo,S.Ag	Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
16	Dr.Donald Sihotang,S.E.,MM	H Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital
17	Ir.Hermanus Suprpto,M.Sc	Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup
18	Zulfahmi Hasan Azhari	Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan
19	Ir.H.Sutono,M.M	Sekretaris
20	Apriliati,S.H.,M.H	Wakil Sekretaris Bidang Internal
21	Hj. Siska,S.E	Wakil Sekretaris Bidang Eksternal
22	Kostiana,S.E.,M.H	Bendahara
23	Ni Ketut Dewi Nadi,S.T	Wakil Bendahara

Sumber: SK Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Periode 2019-2024 (Diolah Oleh Peneliti 2025)

4.4 Gambaran Umum OSP PDI Perjuangan Provinsi Lampung

Kedudukan OSP PDI Perjuangan telah tertuang dalam AD/ART PDI Perjuangan. Dalam AD/ART PDI Perjuangan Tahun 2019-2024, pasal 42 Anggaran Dasar menyebutkan tentang Komunitas Juang, yaitu:

Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya yang se asas dan se aspirasi serta dipimpin oleh kader partai.

1. Komunitas Juang Partai bertugas untuk melakukan pengorganisasian rakyat sesuai dengan jenis komunitasnya sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan dukungan rakyat kepada partai serta penggalangan pemilih.
2. Kepengurusan Komunitas Juang Partai tidak boleh rangkap dengan kepengurusan struktural partai.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Selanjutnya, dijelaskan dalam pasal 39 Anggaran Rumah Tangga, bahwa:

1. Komunitas Juang Partai dalam melaksanakan program atau kegiatannya wajib berkomunikasi, berkoordinasi, dan/atau berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dalam Peraturan Partai.

4.4.1 Banteng Muda Indonesia (BMI)

Logo Organisasi:



Gambar 5. Logo BM

Sumber: Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_BMI.svg)

BMI dibentuk atas dasar prinsip bahwa kaum muda kembali menggelorakan semangat selama 32 tahun terpendam, yaitu semangat nasionalisme. Seperti yang dirumuskan oleh Soekarno bahwa semangat nasionalisme ini merupakan senjata ampuh untuk segera mengangkat rakyat Indonesia dari jurang kesengsaraan. Nasionalisme Soekarno ini pula yang akan membawa Indonesia keluar dari kesulitan ekonomi akibat dari eksploitasi kaum kapitalis. Nasionalisme Soekarno yang menyelamatkan Indonesia dari jurang perpecahan dan Nasionalisme Soekarno pula yang akan membawa Indonesia baru pada puncak kejayaan peradaban manusia.

Berdasarkan prinsip ini, kaum muda merupakan basis kader dan aktivis muda PDI Perjuangan merapatkan barisan dan meneguhkan sikap siap merebut dan membangun kembali nasionalisme yang sejati, yaitu Nasionalisme Kerakyatan. Untuk merealisasikan sikap-sikap dari semangat tersebut, maka dibentuklah sebuah wadah perjuangan untuk kaum muda PDI Perjuangan yang diberi nama BANTENG MUDA INDONESIA.

Struktur Kepengurusan BMI Provinsi Lampung Periode 2019-2024

Tabel 6. Struktur Kepengurusan BMI Provinsi Lampung Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1	Piego Wiliyasa,S.T.,MM	Ketua
2	Dedi Haryadi	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan &Organisasi
3	Irwan Mardiyansyah	Wakil Ketua Bidang Ideologi & Kaderisasi
4	Indra Satuan	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
5	Agung Fatahillah,S.H	Wakil Ketua Bidang Politik, Keamanan Hukum &HAM
6	Ratih Saraswati	Wakil Ketua Bidang Perekonomian
7	Sobri	Wakil Ketua Bidang Kebudayaan
8	Eka Yuda P.R	Wakil Ketua Bidang Kehutanan & Lingkungan Hidup
9	Hafid Septio	Wakil Ketua Bidang Desa & Daerah Tertinggal
10	Novyansa Evan.S.	Wakil Ketua Bidang Riset&Inovasi
11	Rizky Safari.P.L	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif&Digital
12	Hanafi	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana
13	Robbyn Nur	Wakil Ketua Bidang Industri&Ketenagakerjaan
14	Angga Wijaya	Wakil Ketua Bidang Kesehatan&Jaminan Sosial
15	Feberlianita	Wakil Ketua Bidang Perempuan&Anak
16	Dian Mulyani,S.Ag	Wakil Ketua Bidang Koperasi&UMKM
17	Ira Paruca Irawan	Wakil Ketua Bidang Pariwisata
18	Hengky Putrawan	Wakil Ketua Bidang Pemuda&Olahraga
19	W.JR. Mulyadi	Wakil Ketua Bidang Pangan&Pertanian
20	Valla Fernando	Wakil Ketua Bidang Kelautan,Perikanan&Nelayan
21	Naufal Ariel.A.	Wakil Ketua Bidang Pelajar&Mahasiswa
22	Mamanda Syahputra.G.,S.H.,M.H	Wakil Ketua Bidang Pendidikan
23	Dani	Wakil Ketua Bidang Sosial
24	Sekretaris	Irwansyah Agung,S.H
25	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Zahra Khairunnisa
26	Wakil Sekretaris Bidang Eksternal	Ilham Akbar
27	Bendahara	Heri Agus.S.
28	Wakil Bendahara Internal	Marvin Perangin Angin,S.E

Sumber: SK Kepengurusan BMI Provinsi Lampung Periode 2019-2024 (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

4.4.2 Taruna Merah Putih (TMP)

Logo Organisasi:



Gambar 6. Logo TMP

Sumber: Lentera Today (<https://lenteratoday.com/hut-ke-52-pdi-perjuangan-taruna-merah-putih-luncurkan-logo-baru-untuk-memikat-anak-muda/>)

Susunan Kepengurusan TMP Provinsi Lampung Periode 2019-2024

Tabel 7. Susunan Kepengurusan TMP Provinsi Lampung Periode 2019-2024

No	Nama			Jabatan
1	Hj. Nanda Dendi,S.E.,MM	Indira	Ketua	
2	M. Rizki Irwanda			Wakil Ketua Bidang Keanggotaan&Organisasi
3	M. Yoriko Alfarizi			Wakil Ketua Bidang Ideologi&Kaderisasi
4	Fransiskus			Wakil Ketua Bidang Perekonomian
5	Made Ayu Nastiti			Wakil Ketua Bidang Kebudayaan
6	Hendryan Yudhistira			Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan
7	Muh. Fernando			Wakil Ketua Bidang Kehutanan&Lingkungan Hidup
8	Bintang Pratama.P.H			Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
9	Johanes Aspura.H,A.Md			Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana
10	Yohana Siburian			Wakil Ketua Bidang Perempuan & Anak
11	Iqbal Rahmat Ghofari			Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif& Digital
12	M. Irfan Fadila Mabsus			Wakil Ketua Bidang Pemuda&Olahraga
13	Boris Benet Sinaga			Wakil Ketua Bidang Kelautan, Perikanan & Nelayan
14	Lesty Putri Utami,S.H.,M.Kn			Sekretaris
15	Bela Caufista,S.Tr.,Par			Wakil Sekretaris Bidang Internal
16	Bima Agus Triadi,S.A.N			Bendahara
17	Eva Dewi Karyanti,S.E			Wakil Bendahara Internal

Sumber: SK Kepengurusan TMP Provinsi Lampung Periode 2019-2024 (Diolah Ooleh Peneliti, 2025)

4.4.3 Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)

Logo Organisasi:



Gambar 7. Logo BAMUSI

Sumber: Super Radio (<https://www.superradio.id/1-abad-nu-bamusi-surabaya-nu-rawat-jagad-dalam-bingkai-kebhinekaan/>)

Terbentuknya BAMUSI merupakan sebuah harapan baru bagi kader dan politisi muslim PDI Perjuangan dalam melaksanakan sebuah pembangunan kenyamanan dalam kehidupan beragama. BAMUSI hadir sebagai aktor yang bertanggungjawab penuh dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu membangun kenyamanan hidup beragama serta mengakomodir segala perbedaan yang ada diantara kader PDI Perjuangan.

Struktur Kepengurusan BAMUSI Provinsi Lampung Periode 2019-2024

Tabel 8. Struktur Kepengurusan BAMUSI Provinsi Lampung Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1	H. Suparman Abdul K.H	Ketua
2	Cut Habibi,S.Kom	Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial
3	Muchamad Rifai	Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga&Agama
4	H. Djohan Arifin	Wakil Ketua Bidang Pendidikan& Dakwah
5	Fatmali Hadi	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan&Organisasi
6	Rhoimil Ghofar	Wakil Ketua Bidang Humas, Media& Pengembangan Masyarakat
7	Mastaria	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi&Pelatihan
8	Slamet,S.E	Wakil Ketua Bidang Politik
9	Kharisma Maharani	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
10	Anwarudin,S.Sos	Wakil Ketua Bidang Remaja&Pemuda
11	Sudirman	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Rumah Ibadah, Wakaf,Zakat,Infaq&Shodaqoh
12	Junita Kami Tree	Wakil Ketua Bidang Kesehatan&Penanggulangan Bencana
13	Alkaf,S.Sy.,Shi	Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Koperasi, UMKM

14	Husaini,S.Sos	Sekretaris
15	Wahyu Saputra	Wakil Sekretaris
16	Fahria	Wakil Sekretaris
17	Muroji	Bendahara
18	Risma Hamita R.	Wakil Bendahara
19	Andra Lita Utari	Wakil Bendahara

Sumber: SK Kepengurusan TMP Provinsi Lampung Periode 2019-2024 (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

4.4.4 Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)

Logo Organisasi:



Gambar 8. Logo Repdem

Sumber: DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (<https://pdiperjuangan-jatim.com/repdem-rapatkan-barisan-menangkan-jago-pdip-di-pilkada-2017/>)

Repdem dideklarasikan atas dasar kebersamaan dalam cita-cita membangun dan membesarkan PDI Perjuangan untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat. Repdem merupakan himpunan kaum muda tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kedudukan sosial, dan gender.

Struktur Kepengurusan Repdem Provinsi Lampung Periode 2019-2024

Tabel 9. Struktur Kepengurusan Repdem Provinsi Lampung Periode 2019-202

No	Nama	Jabatan
1	Napoleon Oktober Bonaparte,S.H	Ketua
2	Hendra Mahdian Putra,S.E	Sekretaris
3	Yohanes Yudhi W,S.T	Bendahara

Sumber: SK Kepengurusan Repdem Provinsi Lampung Periode 2019-2024 (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang *political linkage* PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024, maka dapat disimpulkan bahwa *linkage* yang terjalin antara PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024 belum cukup terjalin jika dilihat berdasarkan 3 indikator *political linkage* menurut Lawson (Hidayah,E.N, 2010) , yaitu sosialisasi, komunikasi dan rekrutmen yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator sosialisasi yang terdiri dari sub-indikator informasi politik, pengetahuan politik, serta pemberian keyakinan dan kepercayaan politik, bahwa PDI Perjuangan Provinsi Lampung telah memberikan dan memenuhi 3 sub-indikator tersebut kepada OSP pada pemilu 2024. Proses ini diawali dengan keterlibatan OSP dalam proses penyampaian informasi politik, diikuti dengan koordinasi yang rutin untuk memastikan keselarasan pesan politik dengan prinsip dasar PDI Perjuangan. Adanya pendekatan ini, PDI Perjuangan tidak hanya sebatas memperkuat pemahaman kader OSP tentang konteks politik, tapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi yang solid antara partai dengan kader OSP.
2. Berdasarkan indikator komunikasi, PDI Perjuangan secara umum menjalin komunikasi dengan seluruh OSP tetapi hanya dilaksanakan ketika menjelang pemilu saja. Komunikasi yang dilaksanakan ini terlihat dari 4 sub-indikator ini, 2 diantaranya

telah dilaksanakan dengan cukup baik, kemudian sebagai komunikator politik PDI Perjuangan Provinsi Lampung hanya menjalin komunikasi dengan OSP hanya ketika ada kontestasi politik saja. Kemudian untuk indikator saluran atau media politik perlu dioptimalkan kembali terutama media politik PDI Perjuangan Provinsi Lampung dalam menjalin komunikasi dengan OSP, terutama konten-konten yang ada di sosial media PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang berkaitan dengan OSP. politik perlu dioptimalkan kembali media politik PDI Perjuangan Provinsi Lampung dalam menjalin komunikasi dengan OSP, terutama konten-konten yang ada di sosial media PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang berkaitan dengan OSP.

3. Berdasarkan indikator rekrutmen, secara umum telah dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Provinsi Lampung mulai dari Diklat Pratama, Diklat Madya, dan Diklat Utama, kemudian penugasan, kepeloporan dan pelibatan. Namun, terdapat 2 sub-indikator yang tidak dilaksanakan yaitu rekrutmen kader, serta 1 sub-indikator yang perlu diperbaiki yaitu keterlibatan Repdem dalam kegiatan-kegiatan politik PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *linkage* antara PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024 belum cukup terjalin. Hal ini dibuktikan dengan belum tercapainya seluruh indikator penelitian. Selain itu, meskipun terdapat beberapa indikator penelitian yang telah sesuai, proses pelaksanaannya hanya dilakukan ketika menjelang pemilu saja, tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Sehingga proses sosialisasi, komunikasi dan rekrutmen tidak berjalan secara maksimal. Kemudian, terdapat faktor lain yang berpengaruh pada penurunan kursi DPRD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada pemilu 2024, yaitu karena pengaruh dari adanya pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan ketidakmampuan PDI Perjuangan untuk menarik generasi muda

melalui program kegiatan dan memanfaatkan media sosial partai serta *platform digital* untuk menyampaikan pesan politik yang lebih segar dan menarik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terkait dengan analisis *political linkage* PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan OSP pada pemilu 2024, maka peneliti akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pada indikator sosialisasi, peneliti memberikan saran:
 - a. Melaksanakan diskusi atau forum yang lebih terstruktur dan berkualitas untuk meningkatkan kemampuan kader OSP dan tidak hanya dilakukan ketika ada kontestasi politik, tapi harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Seperti membahas isu-isu lokal yang ada di Provinsi Lampung maupun nasional.
 - b. Evaluasi dukungan finansial yang diberikan PDI Perjuangan kepada OSP terhadap output program kegiatan yang dilaksanakan oleh OSP untuk menilai efektivitas program tersebut.
2. Pada indikator komunikasi, peneliti memberikan saran:
 - a. Penggunaan media sosial partai perlu ditingkatkan, dapat dilakukan dengan membuat konten-konten yang menarik dan tidak membosankan, contohnya video infografis, kuis atau live Q&A yang melibatkan OSP.
 - b. Mengadakan pelatihan workshop yang berfokus pada keterampilan komunikasi kader OSP, seperti teknik berbicara didepan umum, dan strategi kampanye.
3. Pada indikator rekrutmen, peneliti memberikan saran:
 - a. Membuka program rekrutmen secara rutin dan terstruktur, misalnya 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali;

- b. Melaksanakan evaluasi atau membuat survei tingkat kepuasan kader terhadap diklat yang telah diterima;
- c. Melaksanakan evaluasi tentang kurangnya partisipasi OSP, terutama keterlibatan Repdem dalam kegiatan-kegiatan PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adhandayani, A. (2020). Modul Metode Penelitian 2 (Kualittatif) Penentuan Subjek dan Sumber Data. 2.
- Al Muchtar, S. (2015). Dasar penelitian kualitatif. *Bandung: Gelar Pustaka Mandiri*.
- Amal, I. (1988). *Teori-teori mutakhir partai politik*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2000). Manajemen Penelitian edisi baru.
- Burhan, B. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. *PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 79*.
- Cangara, H. (2011). Komunikasi politik konsep, teori dan strategi.
- Creswell, J. W. (2012). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.
- Efriza. (2012). *Political explorer: sebuah kajian ilmu politik*. Alfabeta.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.
- Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Sapto Haryok

Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (2004). Ilmu Negara; Umum dan Indonesia.

KOMARUDIN SAHID. *MEMAHAMI SOSIOLOGI POLITIK / KOMARUDIN SAHID*. 2011

Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.

NASUTION, D. S. (1996). Metode penelitian naturalistik kualitatif.

Prihatmoko, J. J. (2003). *Pemilu 2004 dan konsolidasi demokrasi*. LP2I.

Rahmadi, R. (2011). Pengantar metodologi penelitian.

Ramlan, S. (1992). Memahami ilmu politik. *Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia*.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif.

Singarimbun, M. (2008). Metode Penelitian Survei (M. Singarimbun & S. Effendi (eds.)).

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15, 1-332.

Sukmadinata, N. S. (2019). Metode penelitian pendidikan.

Jurnal/Skripsi:

Adi V,A.D.,& Kurniadi,B.D. (2021). Politik Sayap Partai; Taruna Merah Putih dan PDI Perjuangan. (Skripsi)

Andi, A. (2021). *Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Untuk Memperoleh Suara Pemilu Legislatif 2019 Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

- Efriza Efriza, S. I. P., Randisa, A. R., Lestari, A., & Hanif, F. A. (2024). ANALISIS DINAMIKA KOALISI MENUJU PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (PILPRES) 2024. *Ilmu dan Budaya*, 45(2), 117-126.
- Hidayah,E.N. (2010). *Political Linkage Organisasi Sayap Baitul Muslimin Indonesia dengan PDI Perjuangan* (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).
- Cahyati, D. D., Fimmastuti, D. R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Women Leader and Political Linkage: Case Studies in Kutai Kertanegara and Bolaang Mongondow. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 89-106.
- Fauzi Iswari, Arti Penting Organisasi Sayap partai Politik Serta Hubungannya dengan Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Politik Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2018
- Hannan, A., & Abdillah, K. MENAKAR PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK (OSP) DAN PENGARUHNYA TERHADAP DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER.
- Iryana, R. K. (2019). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Sorong*.
- Maulana, R. *Buruh dan Politik Uang: Keterkaitan Politik Koalisi Buruh Jakarta dengan Anies-Sandi di Pilkada Dki Jakarta 2017* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.
- Purnamasari, G. C. (2019). EKSISTENSI, PERAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SAYAP PARTAI POLITIK KEPADA PARTAI POLITIK. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 31-41.
- Rohman, A. Z. F. (2024, January). Institutionalization of Political Linkage for Members of the East Java Regional Legislative Council in Malang RegencyAngga Sukmara Christian Permadi. In *International Conference on*

Social and Politics (ICSP 2023) (pp. 45-53). Atlantis Press.

Setiawan, M. C. A. (2018). Melacak Political Linkage Gerakan Islam Politik dalam Partai-partai Islam di Negara-Negara Mayoritas Muslim: Studi Tentang PKS dan AKP di Indonesia dan Turki.

Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia. *Sasi*, 27(4), 475-491.

Yudistira, A. (2011). Pengaruh pelibatan politik dan sikap tentang demokrasi terhadap toleransi politik mahasiswa fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Internet:

Sonny E. Udjaili, Peran Organisasi Sayap Partai Politik, <https://sonnyudj.wordpress.com/2017/02/03/peranorganisasi-sayap-partaipolitik/> (Diakses pada 09 November 2024)

<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/dc68ed58818aa5a/pdi-perjuangan-pimpin-perolehan-suara-pada-pemilu-2019-gerindra-dan-golkar-mengekor> (Diakses pada 18 November 2024)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/06150031/hasil-pemilu-2019--persentase-suara-dan-jumlah-kursi-parpol?page=all> (Diakses pada 18 November 2024)

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240322085805-128-524342/pemilu-2024-vs-2019-pdip-turun-6-golkar-terbang-34-pks-naik-11> (Diakses pada 18 November 2024)

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan (Diakses Pada 31 Januari 2025)

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_BMI.svg (Diakses Pada 31 Januari 2025)

<https://lenteratoday.com/hut-ke-52-pdi-perjuangan-taruna-merah-putih-luncurkan-logo-baru-untuk-memikat-anak-muda/> (Diakses Pada 31 Januari 2025)

<https://www.superradio.id/1-abad-nu-bamusi-surabaya-nu-rawat-jagad-dalam-bingkai-kebhinekaan/> (Diakses Pada 31 Januari 2025)

<https://pdiperjuangan-jatim.com/repdem-rapatkan-barisan-menangkan-jago-pdip-di-pilkada-2017/> (Diakses Pada 31 Januari 2025))